Jurnal Pendidikan Ekonomi & Akuntansi

Vol. 2, No. 1, Desember 2008 ISSN 1978-8770

1
Hubungan Minat Belajar dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Ditinjau dari Prioritas Pilihan Program Studi, Peringkat Akreditasi, dan Kualitas Pelayanan Program Studi
Laurentius Saptono

23
Berbagai Dimensi dalam Evaluasi Kinerja Perusahaan
Yusef Widya Karsana

39
Pengenaan Pajak bagi Badan Usaha Pendidikan
Bambang Purnomo

55
Perancangan dan Implementasi Model Pembelajaran *E-Learning* untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
Agustinus Heri Nugroho

73
***Performance Audit* : Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Pada Publik**
Rita Eny Purwanti

J. PEA	Vol. 2	No.1	Halaman 1 - 86	Yogyakarta Desember 2008	ISSN 1978-8770

Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Akuntansi

Vol. 2, No. 1, Desember 2008 **ISSN 1978-8770**

Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Akuntansi (JPEA) merupakan wadah informasi bidang pendidikan ekonomi dan akuntansi berupa publikasi hasil karya penelitian, karya ilmiah lain yang relevan, dan studi kepustakaan.
Jurnal ini terbit pertama kali pada Bulan Desember 2007 dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun pada Bulan Juni dan Desember.

Dewan Redaksi

Pemimpin Umum	:	L. Saptono, S.Pd., M.Si.
Sekretaris Redaksi	:	B. Indah Nugraheni, S.I.P., M.Pd.
Anggota	:	S. Widanarto Prijowuntato, S.Pd., M.Si.
		E. Catur Rismiati, S.Pd., M.A.
		Drs. FX. Muhadi, M.Pd.
Redaktur Ahli	:	Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc. (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)
		Prof. Dr. Kisyani Laksono, M.Hum. (Universitas Negeri Surabaya)
		Prof. Dr. Augusty Ferdinand, M.B.A. (Universitas Diponegoro Semarang)
		Dr. C. Asri Budiningsih (Universitas Negeri Yogyakarta)
Tata letak	:	Ig. Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.
Administrasi	:	Natalina Premastuti B., S.Pd.

Alamat Redaksi
Program Studi Pendidikan Akuntansi, FKIP Universitas Sanata Dharma
Jl. Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002. Telp (0274) 513301 Ext. 1445 Faks. (0274) 562383

Berlangganan
Hubungi **Bagian Tata Usaha** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat USD
Jl. Affandi, Mrican, Tromol Pos 29 Telp. (0274) 513301 Ext. 1527, Faks. (0274) 540793
E-mail: lemlit@staff.usd.ac.id. Harga per exemplar Rp 20.000,-.

Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Akuntansi

Vol. 2, No. 1, Desember 2008 **ISSN 1978-8770**

DAFTAR ISI

Hubungan Minat Belajar dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Ditinjau dari Prioritas Pilihan Program Studi, Peringkat Akreditasi, dan Kualitas Pelayanan Program Studi..... 1-22
Laurentius Saptono

Berbagai Dimensi dalam Evaluasi Kinerja Perusahaan..... 23-38
Yusef Widya Karsana

Pengenaan Pajak bagi Badan Usaha Pendidikan..... 39-54
Bambang Purnomo

Perancangan dan Implementasi Model Pembelajaran *E-Learning* untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran..... 55-74
Agustinus Heri Nugroho

Performance Audit : Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Pada Publik..... 73-84
Rita Eny Purwanti

EDITORIAL

Pada terbitan Vol. 2, No. 1, Jurnal Pendidikan & Akuntansi (JPEA) mengetengahkan 5 (lima) hasil karya ilmiah. Pada artikel pertama, Laurentius Saptono, S.Pd.,M.Si menyajikan hasil penelitian yang berjudul "Hubungan Minat Belajar dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Ditinjau dari Prioritas Pilihan Program Studi, Peringkat Akreditasi, dan Kualitas Pelayanan Program Studi". Ada banyak penelitian sebelumnya yang telah mengungkapkan tentang bagaimana hubungan minat belajar mahasiswa dengan prestasi belajar. Secara spesifik penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki tentang bagaimana kemungkinan pengaruh prioritas pilihan program studi, peringkat akreditasi, dan kualitas pelayanan program studi pada derajat hubungan minat belajar dengan prestasi belajar. Artikel kedua, Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si.,Akt mengungkapkan tentang "Berbagai Dimensi dalam Pengukuran Kinerja". Artikel ini mengungkapkan bahwa ada berbagai dimensi pengukuran kinerja pada saat ini. Mengingat hal demikian, karenanya penting untuk memahami berbagai dimensi pengukuran tersebut agar dihasilkan suatu sistem dan *framework* pengukuran kinerja ang tepat agar diperoleh hasil pengukuran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Artikel ketiga, Drs. Bambang Purnomo, S.E.,M.Si memaparkan tentang "Pengenaan Pajak Bagi Badan Usaha Pendidikan". Paparan artikel ini menekankan tentang perlunya memahami keberadaan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (BHPP) dan Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM) dalam hubungannya dengan terapan pajak. Jika suatu BHP dikategorikan sebagai wajib pajak, maka konsekuensi logisnya adalah munculnya kewajiban perpajakan dari BHP tersebut. Artikel keempat, A. Heri Nugroho, S.Pd. menyajikan tulisan "Perancangan dan Implementasi Model Pembelajaran *E-Learning* untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran". Ada banyak cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Tulisan ini memaparkan tentang perlunya pemanfaatan *e-learning* sebagai sarana inovatif untuk meningkatkan kualitas instruksional pembelajaran. Artikel kelima, Rita Eny Purwanti, S.Pd.,M.Si. menyajikan tulisan "*Performance Audit*: Upaya meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah pada Publik". Hasil *performance audit* sangat berguna untuk menakar efektivitas organisasi sektor publik. Laporan auditor yang konstruktif akan bermanfaat bagi pihak legislatif dalam memberikan penilaian terhadap pekerjaan dan kinerja pemerintah dalam penyelesaian pekerjaannya.

Redaksi berharap kehadiran JPEA pada nomer ini semakin mendorong para dosen, alumni, dan praktisi pendidikan lainnya baik dalam maupun luar kampus untuk terus aktif berkarya agar penyebaran ilmu pengetahuan secara meluas kepada masyarakat dapat terwujud secara nyata. Selamat membaca.

Redaksi

HUBUNGAN MINAT BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA DITINJAU DARI PRIORITAS PILIHAN PROGRAM STUDI, PERINGKAT AKREDITASI, DAN KUALITAS PELAYANAN PROGRAM STUDI

Laurentius Saptono*)*

Abstract

The research aims to find out: (1) degree of the students' interest and students' learning achievement in the Faculty of Education and Teacher's Training, Sanata Dharma University; (2) the correlation between the students' interest and students' learning achievement based on their choice of study program; (3) the correlation between the students' interest and students' learning achievement based on the study program accreditation status; and (4) the correlation between the students' interest and students' learning achievement based on the quality of study program. This research was conducted in the Faculty of Education and Teacher's Training, Sanata Dharma University in academic year 2007/2008.

This research was a descriptive research. The population of this research were students of the Faculty of Education and Teacher's Training, Sanata Dharma University. The amount of the samples were 641 students. The method of collecting the samples was purposive sampling. The techniques of collecting data were quesionnaire and interview. The techniques of analysing data were desciptive statistic and Chow regression analysis.

The results of the research are: (1) the students' interest is high and students' learning achievement is excellent; (2) the correlation between the student's interest and students' learning achievement based on their choice of study program is significant ($p=0,019<\alpha=0,050$); (3) the correlation between the students' interest and students' learning achievement based on the study program accreditation status is significant ($p=0,027<\alpha=0,050$); and (4) the correlation between the students' interest and students' learning achievement based on the quality of study program is significant ($p=0,044<\alpha=0,050$).

Kata kunci: *The students' interest, the students' learning achievement, choice of study program, the study program accreditation status, and the quality of study program*

) ***Laurentius Saptono, S.Pd., M.Si.*** *adalah staf pengajar Program Studi Pendidikan Akuntansi USD*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Siswa sekolah menengah sudah mulai memikirkan masa depannya (Jepson dalam Hurlock, 1990). Mereka memusatkan minatnya pada jurusan/ program studi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan/jabatan yang dicita-citakan. Tetapi secara umum, kesadaran/keseriusan sebagian pelajar kelas XII SMA dalam menentukan pilihan jurusan/program studi dan tempat kuliahnya masih dirasakan kurang (Ashari, Kompas 4 Juni 2008). Kondisi kurangnya keseriusan dalam menentukan pilihan studi tersebut akhirnya berdampak pada rendahnya minat belajar saat menempuh studi di perguruan tinggi pada tahap-tahap awal.

Minat (*interest*) merupakan salah satu aspek internal pada diri individu dalam mengarahkan kegiatan-kegiatannya (Myron, 1981). Strong dalam Ebel (1969) menyatakan bahwa minat merupakan bentuk kesadaran individu terhadap suatu objek dimana individu memiliki perhatian yang tetap, perasaan, kegiatan yang terarah pada objek tersebut. Dengan kata lain, minat merupakan bentuk kecenderungan individu dalam menaruh perhatian dan sikap yang terarah terhadap objek tertentu. Kecenderungan mengandung faktor perasaan tertarik dan sikap setuju terhadap objek atau situasi tertentu. Dengan demikian minat belajar dapat dimaknai sebagai bentuk kecenderungan seseorang mereaksi secara konsisten terhadap hal-hal yang berkaitan dengan belajar seperti pada diri sendiri, masa depan, program studi, tugas-tugas yang dihadapi, hasil yang akan dicapai, ujian dan hasil ujian, dan pengajar (Tanlain, 2006).

Syah (2002) menyatakan bahwa minat peserta didik berhubungan dengan pencapaian hasil belajarnya. Dengan kata lain, tinggi rendahnya kemampuan berprestasi dipengaruhi oleh proses penerimaan, pengaktifan, prapengolahan, serta pemanggilan untuk pembangkitan pesan dan pengalaman (Dimyati dan Mujiono, 1999). Kemampuan berprestasi merupakan suatu puncak proses belajar yang membuktikan keberhasilan belajar dalam memecahkan tugas-tugas belajar atau mentransfer hasil belajar. Dengan demikian, prestasi belajar mencerminkan tingkat penguasaan subjek atas kompetensi-kompetensi tertentu baik pengetahuan maupun ketrampilan yang dikembangkan dalam mata kuliah yang secara lazim ditunjukkan dalam nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh pendidik (Crow dan Crow dalam Mukodim, *et.al*, 2004). Peserta didik yang memiliki minat yang tinggi dalam belajar, akan memusatkan perhatian secara intensif dalam belajar. Peserta didik menjadi lebih rajin dalam belajar dan pada akhirnya mencapai prestasi belajar yang diharapkan (Syah, 2002).

Tinggi rendahnya derajat hubungan minat belajar dengan prestasi belajar mahasiswa diduga akan berbeda pada individu yang memiliki karakteristik/kondisi yang berbeda. Hal demikian disebabkan ada faktor endogen dan eksogen yang berhubungan dengan keadaan minat

seseorang (Kartono, 1985; Dimyati dan Mujiono,1999). Faktor-faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah penetapan prioritas pilihan individu terhadap program studi, status akreditasi program studi tempat belajar, dan kualitas pelayanan program studi. Penelitian ini merupakan studi kasus pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sanata Dharma Tahun Akademik (T.A.) 2007/2008.

2. Batasan Masalah

Ada banyak faktor yang diduga berhubungan dengan tinggi rendahnya prestasi belajar mahasiswa. Penelitian ini memfokuskan pada faktor minat belajar mahasiswa. Secara spesifik penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki apakah tinggi/rendahnya derajat hubungan minat belajar dengan prestasi belajar mahasiswa berhubungan dengan penetapan prioritas pilihan mahasiswa terhadap program studi tempat belajar, peringkat akreditasi program studi, dan kualitas pelayanan program studi.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana minat belajar dan prestasi belajar mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma (FKIP-USD) Tahun Akademik 2007/2008?
2. Apakah ada hubungan minat belajar dengan prestasi mahasiswa ditinjau dari prioritas pilihan program studi?
3. Apakah ada hubungan minat belajar dengan prestasi mahasiswa ditinjau dari peringkat akreditasi program studi?
4. Apakah ada hubungan minat belajar dengan prestasi mahasiswa ditinjau dari kualitas pelayanan program studi?

B. Kajian Teori

1. Minat Belajar

Minat (*interest*) adalah sebuah konsep psikologi. Minat merupakan salah satu aspek internal individu manusia yang mengarahkan kegiatan-kegiatannya (Myron, 1981). Strong dalam Ebel (1969) memandang minat sebagai bentuk kesadaran seseorang terhadap suatu objek di mana seseorang memiliki perhatian yang tetap, perasaan, dan melakukan kegiatan yang terarah terhadap objek tersebut. Dengan kata lain, minat dapat diartikan sebagai bentuk kecen-derungan individu dalam menaruh perhatian dan sikap yang terarah pada obyek tertentu. Kecenderungan yang dimaksud mengandung unsur tertarik pada obyek dan sikap setuju pada obyek atau situasi tertentu. Hal demikian disebabkan individu berkontak dengan objek dan mengenal objek tersebut.

Minat belajar merupakan aspek psikologis seseorang yang menaruh perhatian yang tinggi terhadap kegiatan tertentu dan mendorong yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut (Ebel, 1969). Perhatian yang tinggi dan dorongan subjek terhadap terhadap suatu objek tersebut merupakan kecenderungan

yang bersifat menetap pada diri seseorang terhadap suatu objek (Winkel, 1983; Walgito, 1982). Bagi seseorang yang memiliki minat, yang bersangkutan akan merasa senang berkecimpung dan memiliki perasaan ingin tahu, ingin mempelajari, dan kemudian ingin membuktikan lebih lanjut tentang hal yang diketahui. Dengan demikian minat pada diri seseorang tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan suatu proses. Proses itu sendiri merupakan pernyataan psikis yang menunjukkan adanya pemusatan perhatian terhadap suatu obyek tertentu yang menarik perhatian (Mukodim, *et.al*, 2004). Dengan demikian minat belajar merupakan kecenderungan seseorang mereaksi secara konsisten terhadap hal-hal yang berkaitan dengan belajar seperti pada diri sendiri, masa depan, program studi, tugas-tugas yang dihadapi, hasil yang akan dicapai, ujian dan hasil ujian dan pengajar (Tanlain, 2006). Walgito (1982) menyatakan bahwa tinggi rendahya perhatian dan dorongan psikologis pada setiap orang tidaklah sama sehingga tinggi rendahnya minat pun belum tentu sama.

2. Prestasi Belajar

Belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap (Winkel, 1991). Winkel (1983) menyatakan bahwa prestasi belajar adalah hasil penilaian terhadap proses belajar dan hasil belajar. Penilaian terhadap proses belajar mengacu pada kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah memperoleh pengalaman belajar (Sudjana dan Rivai, 2001). Lebih jelas, Loekmono (1988) menyatakan bahwa prestasi belajar merupakan bentuk aktualisasi dari kemampuan dan usaha belajar siswa dalam waktu tertentu. Penilaian dimaksudkan untuk menentukan seberapa jauh hasil belajar telah sesuai dengan tujuan instruksional yang sudah ditetapkan (Winkel, 1983). Cakupan penilaian hasil belajar tersebut adalah kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal (Arifin, 1988:3).

Ada banyak cara mengukur prestasi belajar. Pengajar dapat melakukannya dengan cara mengajukan pertanyaan lisan, memberikan pekerjaan rumah atau tugas tertulis atau melihat penampilan aktual dari tugas keterampilan dan tes tertulis (Crow dan Crow dalam Mukodim, *et.al*, 1984). Winkel (1983) berpendapat bahwa cara mana yang akan digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa biasanya berkaitan dengan tujuan dan bidang prestasi belajar yang akan dievaluasi. Tetapi, yang paling umum dilakukan adalah tes tertulis. Dengan demikian prestasi belajar adalah nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh melalui pengukuran dengan alat tes. Prestasi belajar selanjutnya dapat dilihat dari nilai rapor (siswa) atau indeks prestasi (mahasiswa).

3. Kualitas Pelayanan Program

Studi

Kualitas pelayanan merupakan salah satu penentu eksistensi dari sebuah organisasi jasa. Namun demikian tidaklah mudah mendefinisikan kualitas pelayanan karena konsep kualitas sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif kesempurnaan atau kebaikan suatu produk/jasa (Tjiptono dan Chandra, 2005). Menurut Zeithaml dan Berry (1996), kualitas jasa adalah "*the extent of discrepancy between customer expectation or desires and their perception*". Ada 2 (dua) faktor utama yang mempengaruhi kualitas suatu jasa: jasa yang diharapkan (*expected service*) dan jasa yang diterima (*perceived service*). Kesesuaian antara jasa yang diharapkan dan yang diterima menunjukkan bahwa kualitas jasa baik atau memuaskan, dan begitu pula sebaliknya.

Dalam bidang jasa pendidikan, tinggi rendahnya kualitas pelayanan ditentukan oleh sikap karyawan/dosen terutama yang melakukan kontak langsung dengan pelanggan. Sikap atau cara-cara karyawan/dosen yang baik dan memberikan kepuasan bagi pelanggan akan menjadi dasar bagi terciptanya keunggulan pelayanan (*service excellence*) mereka. Keunggulan seperti ini dibentuk melalui pengintegrasian empat pilar yang saling berkaitan erat: kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan layanan (Tjiptono dan Chandra, 2005). Sementara menurut Parasuraman, Zeilthaml, dan Berry dalam Tjiptono dan Chandra (2005), Keunggulan pelayanan dibentuk oleh antara lain: reliabilitas (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*empathy*), dan bukti fisik (*tangibles*).

4. Peringkat Akreditasi

Akreditasi bagi pendidikan tinggi adalah suatu evaluasi ekternal terhadap suatu perguruan tinggi dan program-program studinya dengan mengkaji, menilai, dan mengaudit kondisi, profil,dan kinerjanya menggunakan kriteria dan standar yang telah disepakati, yang mengarah kepada jaminan, perbaikan, dan kendali mutu (BAN PT, 2005). Akreditasi perguruan tinggi yang diterapkan dalam sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk menilai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penilaian itu diarahkan pada tujuan ganda, yaitu: menginformasikan kinerja perguruan tinggi kepada masyarakat dan mengemukakan langkah pembinaan yang perlu ditempuh terutama oleh perguruan tinggi dan pemerintah, serta partisipasi masyarakat. Peringkat akreditasi merupakan pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada perguruan tinggi didasarkan atas hasil akreditasi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh BAN-PT dengan melakukan akreditasi yang meliputi akreditasi lembaga dan akreditasi program studi. Kriteria penilaian untuk akreditasi lembaga terdiri atas: izin penyelenggaraan pendidikan tinggi, persyaratan dan kelayakan penyelenggaraan pendidikan tinggi, relevansi penyelenggaraan program pendidikan dengan pembangunan, kinerja perguruan tinggi, dan efisiensi

pengelolaan perguruan tinggi (http://www.pts. co.id/pascaban.asp).

5. Kerangka Teoretik

Prestasi belajar adalah hasil penilaian terhadap proses belajar dan hasil belajar (Winkel, 1983). Penilaian terhadap proses belajar mengacu pada kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah memperoleh pengalaman belajar (Sudjana dan Rivai, 2001). Dengan demikian, prestasi belajar merupakan bentuk aktualisasi dari kemampuan dan usaha belajar siswa dalam waktu tertentu (Loekmono, 1988). Penilaian dimaksudkan untuk menentukan seberapa jauh hasil belajar telah sesuai dengan tujuan instruksional yang sudah ditetapkan baik dari sisi kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal (Arifin, 1988).

Menurut Dimyati dan Mujiono (1999), tinggi atau rendahnya kemampuan berprestasi dipengaruhi oleh proses penerimaan, pengaktifan, prapengolahan, serta pemanggilan untuk pembangkitan pesan dan pengalaman. Secara lebih spesifik Syah (2002) menyatakan bahwa minat peserta didik berhubungan dengan pencapaian hasil belajarnya. Kemampuan berprestasi merupakan suatu puncak proses belajar yang membuktikan keberhasilan belajar dalam memecahkan tugas-tugas belajar atau mentransfer hasil belajar. Prestasi belajar mencerminkan tingkat penguasaan subjek atas kompetensi-kompetensi tertentu baik pengetahuan maupun keterampilan yang dikembangkan dalam mata kuliah yang secara lazim ditunjukkan dalam nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh pendidik (Crow dan Crow dalam Mukodim, *et.al*, 2004).

Para mahasiswa umumnya telah mulai memikirkan masa depannya saat mereka masuk ke perguruan tinggi. Pilihan jurusan/program studi mahasiswa berkaitan dengan bidang pekerjaan/jabatan yang dicita-citakannya. Idealnya, mereka memanfaatkan secara serius kesempatan belajar berdasarkan potensi diri untuk mencapai cita-cita. Penetapan prioritas pilihan mahasiswa terhadap jurusan/program studi saat awal masuk perguruan tinggi diduga kuat berhubungan dengan minat mereka dalam belajar. Saat mahasiswa diterima pada jurusan/program studi yang diharapkan, maka minat mereka dalam belajar akan tinggi dan prestasinya pun tinggi pula. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Ada hubungan minat belajar dengan prestasi mahasiswa ditinjau dari prioritas pilihan program studi

Akreditasi perguruan tinggi yang diterapkan dalam sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk menilai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Status akreditasi bagi pendidikan tinggi adalah bentuk pengakuan terhadap suatu lembaga yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat

yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi atau untuk dapat menjalankan praktik profesinya. Penilaian akreditasi diarahkan pada tujuan ganda, yaitu: menginformasikan kinerja perguruan tinggi kepada masyarakat dan mengemukakan langkah pembinaan yang perlu ditempuh terutama oleh perguruan tinggi dan pemerintah, serta partisipasi masyarakat. Peringkat pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada perguruan tinggi didasarkan atas hasil akreditasi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, dengan melakukan akreditasi yang meliputi akreditasi lembaga dan akreditasi program studi.

Pilihan seorang mahasiswa terhadap program studi tempat belajar diduga berhubungan dengan peringkat/ status akreditasi program studi. Mahasiswa yang belajar pada program studi dengan peringkat akreditasi lebih baik diduga minat mereka dalam belajar pun lebih tinggi dan prestasi belajarnya pun lebih baik. Dengan kata lain, semakin baik peringkat akreditasi tempat mahasiswa belajar, maka akan semakin menguatkan hubungan minat belajar dengan prestasi belajar mahasiswa. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2: Ada hubungan minat belajar dengan prestasi mahasiswa ditinjau dari peringkat akreditasi program studi

Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kesempurnaan atau kebaikan sebuah produk/jasa (Tjiptono dan Chandra, 2005). Dalam bidang pendidikan tinggi, kualitas pelayanan program studi (dosen dan karyawan) berhubungan dengan kepuasaan pelanggan (mahasiswa) terhadap layanan yang dirasakannya. Keunggulan jasa pelayanan program studi setidaknya dibentuk dari pengintegrasian empat pilar yang saling berkaitan erat: kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan layanan (Tjiptono dan Chandra, 2005).

Kualitas pelayanan program studi adalah faktor ekstern yang berhubungan dengan minat belajar mahasiswa. Diduga kuat bahwa jika kualitas pelayanan baik, maka minat belajar mahasiswa tinggi dan prestasi belajarnya pun meningkat. Dengan kata lain, semakin baik pelayanan program studi, maka diduga semakin menguatkan hubungan minat belajar dengan prestasi belajar mahasiswa. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3: Ada hubungan minat belajar dengan prestasi mahasiswa ditinjau dari kualitas pelayanan program studi

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan hubungan minat belajar dengan prestasi belajar ditinjau dari prioritas pilihan program studi, peringkat akreditasi program studi, dan kualitas pelayanan program studi. Penelitian ini

merupakan studi kasus pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Sanata Dharma Tahun Akademik 2007/2008.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Sanata Dharma pada bulan April sampai September 2008.

3. Populasi, Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Tahun Akademik 2007/2008. Sampel penelitian ini adalah sebagian mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma pada Tahun Akademik 2007/2008. Jumlah sampel penelitian ini adalah 765 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara. Metode kuesioner dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang minat belajar, prestasi belajar, prioritas pilihan mahasiswa terhadap program studi, peringkat akreditasi, dan kualitas pelayanan program studi. Dalam penelitian ini kuesioner penelitian disampaikan secara langsung oleh peneliti kepada mahasiswa FKIP, Universitas Sanata Dharma Tahun Akademik 2007/2008. Sedangkan metode wawancara dilakukan untuk mendalami data yang dikumpulkan melalui kuesioner.

5. Operasionalisasi Variabel Penelitian

a. Variabel Minat Belajar

Minat belajar merupakan aspek psikologis mahasiswa dalam menaruh perhatian terhadap kegiatan belajar dan yang mendorongnya melaksanakan kegiatan tersebut secara sungguh-sungguh. Indikator minat dalam penelitian ini mencakup: perhatian, perasaan senang, keinginan untuk terlibat, harapan untuk memperoleh manfaat, pendirian, kemampuan, konsentrasi, dan rasa ingin tahu. Berdasarkan indikator tersebut disusun satu atau serangkaian pernyataan. Jumlah pernyataan dalam penelitian ini adalah 14 butir pernyataan. Skala pengukuran pada setiap pernyataan disusun skor dengan mengacu pada 5 (lima) skala Likert.

b. Variabel Prioritas Pilihan Program Studi

Prioritas pilihan program studi merupakan penetapan pilihan program studi oleh mahasiswa saat mereka mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa di Universitas Sanata Dharma. Pengukuran variabel prioritas pilihan mahasiswa terhadap program studi adalah sebagai berikut: apabila program studi tempat belajar mahasiswa saat ini merupakan pilihan 1, maka diberi skor 3; pilihan 2 diberi skor 2; dan pilihan 3 diberi skor 1.

c. Variabel Peringkat Akreditasi Program Studi

Peringkat akreditasi program studi adalah penetapan peringkat akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi terhadap program studi yang saat ini menjadi tempat belajar mahasiswa. Pengukuran variabel peringkat akreditasi program studi adalah sebagai berikut: apabila peringkat akreditasi program studi tempat belajar mahasiswa saat ini mendapatkan nilai A, maka diberi skor 3; peringkat akreditasi B diberi skor 2; peringkat akreditasi C diberi skor 1; dan belum memiliki status akreditasi diberi skor 0.

d. Variabel Kualitas Pelayanan Program Studi

Kualitas pelayanan program studi merupakan ukuran kualitatif pelayanan program studi (dosen dan karyawan) menurut persepsian para mahasiswa atas apa yang dirasakan selama menjalani proses belajar. Dimensi kualitas pelayanan mencakup lima dimensi, yaitu: keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*empathy*), dan bukti fisik (*tangibles*). Pada setiap dimensi selanjutnya dijabarkan dalam sejumlah indikator. Berdasarkan indikator tersebut disusun pernyataan atau serangkaian pernyataan. Jumlah pernyataan dalam penelitian ini adalah 44 butir pernyataan. Skala pengukuran pada setiap pernyataan disusun skor dengan mengacu pada 5 (lima) skala Likert.

6. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Pengujian validitas instrumen penelitian dimaksudkan untuk memastikan apakah setiap butir instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas instrumen secara empirik dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan metode analisis butir yang dilakukan dengan cara menguji apakah item telah mengungkapkan faktor atau indikator yang ingin diselidiki. Perhitungan dilakukan berdasarkan alat statistik korelasi *product moment* dari Karl Pearson (Arikunto, 1998). Pengujian validitas butir sudah dilakukan berdasarkan jawaban 30 responden di luar responden penelitian ini. Hasil pengujian validitas empirik menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, keseluruhan butir pernyataan variabel minat belajar dan kualitas pelayanan program studi dalam penelitian ini adalah valid (nilai koefisien korelasi (r) setiap butir lebih dari nilai koefisien korelasi (r) pada tabel sebesar 0,239).

Pengujian reliabilitas instrumen penelitian dimaksudkan untuk memastikan apakah instrumen cukup dapat dipercaya (memiliki tingkat konsistensi yang memadai) sebagai alat pengumpul data. Pengujian reliabilitas instrumen penelitian ini didasarkan rumus Cronbach Alpha (Arikunto, 1998:110). Hasil pengujian reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa koefisien Cronbach Alpha untuk variabel minat belajar sebesar 0,870 dan kualitas pelayanan program studi

sebesar 0,852. Oleh karena nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,60 (Nunnaly, 1978 dalam Gozhali, 2001), maka kedua instrumen penelitian ini dinyatakan reliabel.

7. Teknik Analisis Data

a. Statistik Deskriptif

Statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui metode kuesioner. Pendeskripsian data penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan Pedoman Acuan Patokan (PAP) tipe II dan dilengkapi dengan perhitungan-perhitungan mean, median, modus, dan standar deviasi.

b. Pengujian Prasyarat Analisis

1). Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas dimaksudkan untuk menyelidiki apakah data penelitian berdistribusi normal ataukah tidak. Pengujian normalitas didasarkan tes *one sample Kolmogorov-Smirnov* (Kohler, 1985). Besarnya nilai nilai probabilitas (ñ) dihitung pada taraf signifikansi 5%. Apabila nilai probabilitas (ñ) yang diperoleh melalui perhitungan lebih besar dari taraf signifikansi (a) maka dinyatakan sebaran data penelitian dinyatakan normal.

2). Pengujian Linearitas

Pengujian lineritas dimaksudkan untuk menyelidiki apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat penelitian ini. Pengujian linearitas dilakukan berdasarkan uji F (Sudjana, 1996). Besarnya nilai nilai probabilitas (ñ) dihitung pada taraf signifikansi 5%. Apabila nilai probabilitas (ñ) yang diperoleh melalui perhitungan lebih besar dari taraf signifikansi (a) maka dinyatakan terdapat hubungan yang bersifat linear antara variabel bebas dengan variabel terikat.

c. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan rumus regresi yang dikembangkan oleh Chow (Gujarati, 1995):

$$Y_1 = a_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3(X_1X_2) + u_1$$

Keterangan:

Y = Variabel prestasi belajar

a_o = Konstanta

X_1 = Variabel minat belajar

X_2 = Variabel prioritas pilihan mahasiswa terhadap program studi/peringkat akreditasi/ kualitas pelayanan program studi

X_1X_2 = Nilai interaksi antara minat belajar mahasiswa dengan variabel prioritas pilihan mahasiswa terhadap program studi/peringkat akreditasi/ kualitas pelayanan program studi

$b_1/b_2/b_3$ = Koefisien regresi

u_1 = Pengganggu regresi

Untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi dari interaksi variabel X_1X_2 terhadap Y_1 maka dilakukan pembandingan nilai signifikansi koefisien regresi (b_3)

dengan taraf signifikan (α) yang digunakan dalam penelitian ini yakni 0,05. Hipotesis penelitian ini akan diterima bila nilai signifikansi koefisien regresi (b_3) lebih rendah dari taraf signifikansi (α) = 0,05.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Deskripsi Data

Jumlah responden penelitian ini adalah 765 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Sanata Dharma pada Tahun Akademik 2007/2008. Responden penelitian tersebar pada 11 program studi di FKIP, Universitas Sanata Dharma. Dari jumlah responden penelitian tersebut, responden yang mengisi kuesioner penelitian secara lengkap sebanyak 641 mahasiswa. Dengan demikian tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) oleh responden penelitian ini adalah 85,09%. Berikut ini disajikan deskripsi data responden dan data penelitian ini.

a. Deskripsi Responden Penelitian Berdasarkan Asal Program Studi

Deskripsi responden penelitian ini menunjukkan bahwa 67 mahasiswa (10,45%) berasal dari Program Studi Pendidikan Akuntansi, 15 mahasiswa (2,34%) dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, 70 mahasiswa (10,92%) dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 30 mahasiswa (4,68%) dari Program Studi Pendidikan Sejarah, 121 mahasiswa (18,88%) dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, 82 mahasiswa (12,79%) dari Program Studi Pendidikan Matematika, 15 mahasiswa (2,34%) dari Program Studi Pendidikan Fisika, 82 mahasiswa (12,79%) dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1), 91 mahasiswa (14,20%) dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (D2), 32 mahasiswa (5,00%) dari Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling, 36 mahasiswa (5,61%) dari Program Studi Ilmu Pendidikan Pendidikan Agama Katolik.

b. Deskripsi Status Akreditasi

Deskripsi status akreditasi (sampai dengan Juli 2008) menunjukkan bahwa Program Studi: Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bimbingan dan Konseling, dan Ilmu Pendidikan Pendidikan Agama Katolik adalah A (sangat baik); Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (D2) adalah B (baik); sementara Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) belum memiliki status akreditasi.

c. Deskripsi Prioritas Pilihan Responden Terhadap Program Studi

Deskripsi prioritas pilihan responden terhadap program studi menunjukkan bahwa jumlah responden yang menempatkan program studi tempat belajar saat ini sebagai: pilihan

pertama adalah 411 mahasiswa atau 64,12%, pilihan kedua adalah 118 mahasiswa atau 18,41%, dan pilihan ketiga adalah 112 mahasiswa atau 17,47%.

d. Deskripsi Indeks Prestasi Responden

Indeks prestasi responden menunjukkan bahwa jumlah responden yang memiliki indeks prestasi belajar: 3,51–4,00 sebanyak 34 mahasiswa atau 5,30%, 2,76–3,50 sebanyak 291 mahasiswa atau 45,40%, 2,00–2,75 sebanyak 242 mahasiswa atau 37,75%, 0,00–1,99 sebanyak 74 mahasiswa atau 11,55%. Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa indeks prestasi rata-rata sebesar 2,69, nilai median sebesar 2,77, nilai modus sebesar 3, dan nilai standar deviasi sebesar 0,57. Dengan demikian secara umum disimpulkan bahwa indeks prestasi mahasiswa adalah sangat memuaskan (Peraturan Akademik USD, 2002).

e. Deskripsi Minat Belajar Mahasiswa

Deskripsi minat belajar mahasiswa menunjukkan bahwa jumlah responden yang memiliki minat belajar: sangat tinggi sebanyak 85 mahasiswa atau 13,26%, tinggi sebanyak 332 mahasiswa atau 51,80%, cukup sebanyak 161 mahasiswa atau 25,12%, rendah sebanyak 39 mahasiswa atau 6,08%, dan sangat rendah sebanyak 24 mahasiswa atau 3,74%. Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 52,90, nilai median sebesar 53, nilai modus sebesar 53, dan nilai standar deviasi sebesar 6,68. Dengan demikian secara umum disimpulkan bahwa minat belajar mahasiswa adalah tinggi.

f. Deskripsi Kualitas Pelayanan Program Studi

Deskripsi kualitas pelayanan program studi menunjukkan bahwa jumlah responden yang memiliki persepsian terhadap kualitas pelayanan program studi: sangat baik sebanyak 107 mahasiswa atau 16,69%, baik sebanyak 354 mahasiswa atau 55,23%, cukup sebanyak 127 mahasiswa atau 19,81%, buruk sebanyak 42 mahasiswa atau 6,55%, dan sangat buruk sebanyak 11 mahasiswa atau 1,72%. Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 167,47, nilai median sebesar 169, nilai modus sebesar 170, dan nilai standar deviasi sebesar 18,84. Dengan demikian secara umum disimpulkan bahwa kualitas pelayanan program studi adalah baik.

2. Analisis Data dan Pembahasan

a. Pengujian Persyaratan Analisis Data

1). Pengujian Normalitas

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *asymptotic significance* (*asymp. sig.*) baik untuk distribusi data minat belajar mahasiswa maupun prestasi belajar mahasiswa lebih kecil dari nilai alpha (a) = 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa distribusi data kedua variabel tersebut adalah normal.

Tabel 1: Pengujian Normalitas (*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*)

		Minat Belajar	Prestasi Belajar
N		641	641
Normal Parameters (a,b)	Mean	52,2902	2,6985
	Std. Deviation	6,68254	,57486
Most Extreme Differences	Absolute	,076	,063
	Positive	,061	,030
	Negative	-,076	-,063
Kolmogorov-Smirnov Z		1,916	1,597
Asymp. Sig. (2-tailed)		,001	,012

a Test distribution is Normal
b Calculated from data

2). Pengujian Linearitas

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *asymptotic significance* (*asymp. sig.*) adalah 0,597. Nilai tersebut lebih besar dari nilai alpha (α) = 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan variabel minat belajar dengan prestasi belajar mahasiswa bersifat linear.

b. Analisis Data dan Pembahasan

1). Minat belajar dan prestasi belajar mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Tahun Akademik 2007/2008

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah responden dengan minat belajar kategori: sangat tinggi sebanyak 85 mahasiswa (13,26%), tinggi sebanyak 332 mahasiswa (51,80%), cukup tinggi sebanyak 161 mahasiswa (25,12%), rendah sebanyak 39 mahasiswa (6,08%), dan sangat rendah sebanyak 24 mahasiswa (3,74%). Nilai rata-rata minat belajar mahasiswa adalah sebesar 52,90, nilai median sebesar 53, nilai modus sebesar 53, dan nilai standar deviasi sebesar 6,68. Secara umum, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sanata Dharma memiliki minat belajar yang tinggi.

Dalam hal prestasi belajar, jumlah responden yang memiliki indeks

Tabel 2: Pengujian Linearitas (*F-Test*)

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	(Combined)		7090,220	162	43,767	,974	,574
	Linear Term	Weighted	98,146	1	98,146	2,183	,140
		Deviation	6992,074	161	43,429	,966	,597
	Within Groups		21489,808	478	44,958		
	Total		28580,028	640			

prestasi belajar: 3,51 – 4,00 sebanyak 34 mahasiswa (5,30%); 2,76 – 3,50 sebanyak 291 mahasiswa (45,40%); 2,00 – 2,75 sebanyak 242 mahasiswa (37,75%), dan 0,00 – 1,99 sebanyak 74 mahasiswa (11,55%). Nilai rata-rata indeks belajar adalah 2,79, nilai median sebesar 2,77, nilai modus sebesar 3, dan nilai standar deviasi sebesar 0,57. Dengan demikian secara umum disimpulkan bahwa prestasi mahasiswa adalah sangat memuaskan (Peraturan Akademik USD, 2002). Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan variabel minat belajar dengan variabel prestasi belajar mahasiswa. Derajat hubungan kedua variabel tersebut adalah positif dan dikategorikan cukup tinggi (r = 0,509).

2). Hubungan minat belajar dengan prestasi belajar mahasiswa ditinjau dari prioritas pilihan program studi

Berdasarkan hasil pengujian ANOVA sebagaimana tersaji pada tabel 3 di bawah, model persamaan regresi dapat disajikan sebagai berikut:

Y_i = 4,283 + 1,005X_1 + 0,441X_2 + 0,560 (X_1X_2)

(1,512) (0,226) (0,084) (0,108)

t = (4,456) (3,404) (2,060) (3,268)

r = 0,709; R^2 = 0,503

Keterangan:

Y_i = Variabel prestasi belajar mahasiswa

X_1 = Variabel minat belajar

X_2 = Variabel prioritas pilihan program studi

X_1X_2 = Nilai interaksi antara minat belajar dengan prioritas pilihan program studi

Hasil pengujian regresi di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi minat belajar dan prioritas pilihan program studi dengan prestasi belajar mahasiswa adalah 0,709. Nilai

Tabel 3: Pengujian *ANOVA*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,283	1,512		4,456	,000
	Mnt Bljr*)	1,005	,226	,055	3,404	,002
	Pil PS**)	,441	,084	,018	2,060	,042
	Mnt BljrXPil PS***)	,560	,108	,075	3,268	,019

Keterangan:
1. Variabel Prediktor
   *) = Minat belajar
   **) = Pilihan program studi
   ***) = Interaksi minat belajar dengan pilihan program studi
2. Variabel Dependen: Prestasi belajar mahasiswa

koefisien korelasi tersebut menunjukkan derajat hubungan yang dikategorikan tinggi. Sementara, nilai koefisien regresi (b_3) dari interaksi variabel minat belajar dengan pilihan program studi terhadap prestasi belajar mahasiswa adalah 0,560. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa interaksi kedua variabel menguatkan derajat hubungan minat belajar dengan prestasi belajar mahasiswa. Nilai signifikansi koefisien regresi (b_3)dari interaksi variabel minat belajar dengan pilihan program studi menunjukkan lebih rendah dari nilai alpha yang digunakan dalam penelitian ini (p= 0,019 < α = 0,050). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho penelitian ini ditolak. Artinya, ada hubungan yang signifikan minat belajar dengan prestasi belajar mahasiswa ditinjau dari prioritas pilihan program studi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dugaan awal penelitian ini. Menurut Dimyati dan Mujiono (1999), tinggi atau rendahnya kemampuan berprestasi dipengaruhi oleh proses penerimaan, pengaktifan, prapengolahan, serta pemanggilan untuk pembangkitan pesan dan pengalaman. Secara lebih spesifik Syah (2002) menyatakan bahwa minat peserta didik berhubungan dengan pencapaian hasil belajarnya. Kemampuan berprestasi merupakan suatu puncak proses belajar yang membuktikan keberhasilan belajar dalam memecahkan tugas-tugas belajar atau mentransfer hasil belajar. Prestasi belajar mencerminkan tingkat penguasaan subjek atas kompetensi-kompetensi tertentu baik pengetahuan maupun ketrampilan yang dikembangkan dalam mata kuliah yang secara lazim ditunjukkan dalam nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh pendidik (Crow dan Crow dalam Mukodim, *et.al*, 2004).

Para mahasiswa umumnya telah mulai memikirkan masa depannya. Mereka memilih jurusan/program studi saat mereka masuk ke perguruan tinggi. Pilihan jurusan/program studi tersebut berkaitan dengan bidang pekerjaan/jabatan yang dicita-citakannya. Karenanya, mereka memanfaatkan secara serius kesempatan belajar berdasarkan potensi diri untuk mencapai cita-cita dan hal tersebut berdampak pada peningkatan prestasi mereka dalam belajar.

3). Hubungan minat belajar dengan prestasi belajar mahasiswa ditinjau dari peringkat akreditasi program studi

Berdasarkan hasil pengujian ANOVA sebagaimana tersaji pada tabel 4, model persamaan regresi dapat disajikan sebagai berikut:

Y_i = 3,581 + 2,702X_1 + 0,200X_2 + 0,830 (X_1X_2)
(1,365) (0,507) (0,003) (0,157)
t = (7,079) (4,181) (2,706) (2,530)
r = 0,678; R^2 = 0,461

Keterangan:
Y_i = Variabel prestasi belajar mahasiswa
X_1 = Variabel minat belajar
X_2 = Variabel peringkat akreditasi program studi

Tabel 4: Pengujian *ANOVA*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,581	1,365		7,079	,000
	Mnt Bljr*)	2,702	,507	,014	4,181	,016
	Akd PS***)	,200	,003	,190	2,706	,048
	Mnt BljrXAkd PS***)	,830	,157	,141	2,530	,027

Keterangan:
1. Variabel Prediktor
   *) = Minat belajar
   **) = Peringkat akreditasi program studi
   ***) = Interaksi minat belajar dengan peringkat akreditasi program studi
2. Variabel Dependen: Prestasi belajar mahasiswa

X_1X_2 =Nilai interaksi antara minat belajar dengan peringkat akreditasi program studi

Hasil pengujian regresi di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi minat belajar dan peringkat akreditasi program studi dengan prestasi belajar mahasiswa adalah 0,678. Nilai koefisien korelasi tersebut menunjukkan derajat hubungan yang dikategorikan tinggi. Sementara, nilai koefisien regresi (b_3) dari interaksi variabel minat belajar dengan peringkat akreditasi program studi adalah 0,830. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa interaksi kedua variabel menguatkan derajat hubungan minat belajar dengan prestasi belajar mahasiswa. Nilai signifikansi koefisien regresi (b_3)dari interaksi variabel minat belajar dengan peringkat akreditasi program studi menunjukkan lebih rendah dari nilai alpha yang digunakan dalam penelitian ini ($p = 0,027 < \alpha = 0,050$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho penelitian ini ditolak. Artinya, ada hubungan yang signifikan minat belajar dengan prestasi belajar mahasiswa ditinjau dari peringkat akreditasi program studi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dugaan awal penelitian ini. Akreditasi perguruan tinggi yang diterapkan dalam sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk menilai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Status akreditasi bagi pendidikan tinggi adalah bentuk pengakuan terhadap suatu lembaga yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi atau untuk dapat menjalankan praktik profesinya. Penilaian akreditasi diarahkan pada tujuan ganda, yaitu: menginformasikan kinerja perguruan tinggi kepada masyarakat dan mengemukakan langkah pembinaan yang perlu

ditempuh terutama oleh perguruan tinggi dan pemerintah, serta partisipasi masyarakat. Peringkat pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada perguruan tinggi didasarkan atas hasil akreditasi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, dengan melakukan akreditasi yang meliputi akreditasi lembaga dan akreditasi program studi.

Pilihan seorang mahasiswa terhadap program studi tempat belajar dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan dengan peringkat/ status akreditasi program studi. Peringkat akreditasi yang baik mendorong minat mahasiswa dalam belajar. Peningkatan minat mahasiswa dalam belajar selanjutnya memiliki dampak pada peningkatan prestasi belajarnya.

4). Hubungan minat belajar dengan prestasi belajar mahasiswa ditinjau dari kualitas pelayanan program studi

Berdasarkan hasil pengujian ANOVA sebagaimana tersaji pada tabel 5, model persamaan regresi dapat disajikan sebagai berikut:

Y_i = 3,450 + 0,510X_1 + 0,352X_2 + 0,473 (X_1X_2)
(1,112) (0,022) (0,000) (0,007)
t = 3,203) (2,660) (2,256) (2,197)
r = 0,615; R^2 = 0,378

Keterangan:

Y_i = Variabel prestasi belajar mahasiswa
X_1 = Variabel minat belajar
X_2 = Variabel kualitas pelayanan program studi
X_1X_2 = Nilai interaksi antara minat belajar dengan kualitas pelayanan program studi

Hasil pengujian regresi di atas bahwa nilai koefisien korelasi minat belajar dan kualitas pelayanan program studi dengan prestasi belajar mahasiswa adalah 0,615. Nilai koefisien korelasi menunjukkan derajat

Tabel 5: Pengujian *ANOVA*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,450	1,112		3,203	,028
	Mnt Bljr*)	,510	,022	,171	2,660	,035
	KP PS**)	,352	,000	,104	2,256	,049
	Mnt BljrXKP PS***)	,473	,007	,044	2,197	,044

Keterangan:

1. Variabel Prediktor
   *) = Minat belajar
   **) = Kualitas pelayanan program studi
   ***) = Interaksi minat belajar dengan kualitas pelayanan program studi
2. Variabel Dependen: Prestasi belajar mahasiswa

hubungan yang dikategorikan tinggi. Sementara, nilai koefisien regresi (b_3) dari interaksi variabel minat belajar dengan kualitas pelayanan program studi adalah 0,473. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa interaksi kedua variabel menguatkan derajat hubungan minat belajar dengan prestasi belajar mahasiswa. Nilai signifikansi koefisien regresi (b_3)dari interaksi variabel minat belajar dengan kualitas pelayanan program studi menunjukkan lebih rendah dari nilai alpha yang digunakan dalam penelitian ini ($p=0,044 < \alpha=0,050$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho penelitian ini ditolak. Artinya, ada hubungan yang signifikan minat belajar dengan prestasi belajar mahasiswa ditinjau dari kualitas pelayanan program studi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dugaan awal penelitian ini. Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kesempurnaan atau kebaikan sebuah produk/jasa (Tjiptono dan Chandra, 2005). Dalam bidang pendidikan tinggi, kualitas pelayanan program studi (dosen dan karyawan) berhubungan dengan kepuasaan pelanggan (mahasiswa) terhadap layanan yang diberikan program studi. Keunggulan jasa pelayanan program studi setidaknya dibentuk dari pengintegrasian empat pilar yang saling berkaitan erat: kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan layanan (Tjiptono dan Chandra, 2005). Kualitas pelayanan program studi tersebut merupakan faktor ekstern yang berhubungan dengan minat belajar mahasiswa. Pelayanan program studi yang baik meningkatkan minat mahasiswa dalam belajar. Peningkatan minat belajar mahasiswa selanjutnya berdampak pada prestasi belajar mereka yang meningkat.

E. Penutup

1. Kesimpulan

a. Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma secara umum memiliki minat belajar yang tinggi dan prestasi belajar yang sangat memuaskan.
b. Ada hubungan yang signifikan minat belajar dengan prestasi mahasiswa ditinjau dari prioritas pilihan program studi.
c. Ada hubungan yang signifikan minat belajar dengan prestasi mahasiswa ditinjau dari peringkat akreditasi program studi.
d. Ada hubungan minat belajar dengan prestasi belajar mahasiswa ditinjau dari kualitas pelayanan program studi.

2. Saran

a. Universitas perlu melakukan evaluasi terhadap proses penerimaan mahasiswa baru (PMB) yang selama ini dilaksanakan. Evaluasi tersebut dapat dimulai dengan melakukan pemetaan atas pilihan calon mahasiswa terhadap program studi. Berdasarkan pengamatan penulis selama terlibat dalam proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru, calon mahasiswa secara

umum cenderung menempatkan program studi tertentu sebagai pilihan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa program studi tertentu lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan program studi lainnya. Memang ada banyak faktor yang kemungkinan menyebabkan hal ini. Di samping persoalan kondisi pasar, kemungkinan banyak calon mahasiswa masih kurang memiliki informasi yang cukup tentang program-program studi lainnya di Universitas Sanata Dharma. Pada tingkat universitas, publikasi perlu lebih menyentuh program studi yang selama ini belum dikenal luas oleh masyarakat umum. Sementara pada tingkat program studi, publikasi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan program studi yang bersifat promotif kepada masyarakat.

b. Pencapaian status tertinggi akreditasi program studi bagaimanapun perlu diusahakan oleh setiap program studi. Hal demikian disebabkan masyarakat secara umum memahami kualitas proses pembelajaran berdasarkan pencapaian status akreditasi oleh pemerintah. Mahasiswa umumnya memiliki kebanggaan tersendiri saat mereka menempuh studi pada program studi yang memiliki status akreditasi yang baik. Kebanggaan mahasiswa terhadap program studinya akan meneguhkan minat mereka dalam belajar di universitas ini.

c. Perlunya program studi terus meningkatkan kualitas pelayanan akademik maupun non akademik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan akademik dapat dilakukan program studi dengan menginformasikan perencanaan pembelajaran lebih dini kepada para mahasiswa, dosen perlu lebih meluangkan waktu yang cukup banyak dalam pelayanan bimbingan di luar kelas khususnya kepada mahasiswa yang sedang menulis tugas akhir, dosen/staf lebih cepat memberikan informasi kepada mahasiswa saat mereka tidak dapat mengisi kegiatan pembelajaran di kelas karena ada tugas luar, dan lain-lain.

d. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut dengan melibatkan lebih banyak variabel prediktor lainnya, seperti: variabel intensitas mahasiswa mengikuti kegiatan non akademik kemahasiswaan, kualitas pelayanan perpustakaan, ketersediaan media pembelajaran yang modern, dll. Perlu juga diidentifikasi variabel-variabel pemoderasi lain yang relevan dan berpengaruh pada hubungan variabel-prediktor dengan prestasi mahasiswa. Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan rancangan penelitian yang lebih baik, baik yang terkait dengan penyusunan kuesioner maupun yang terkait dengan keluasan responden penelitian.

3. Keterbatasan Penelitian

Sumber data penelitian ini dikumpulkan sebagian besar dikumpulkan berdasarkan jawaban responden atas kuesioner. Ada kemungkinan bahwa responden-responden penelitian menjawab item-item pertanyaan kurang sungguh-sungguh, meskipun hal tersebut telah diantisipasi oleh peneliti dengan memberikan arahan kepada para mahasiswa agar kuesioner diisi berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Peneliti juga menyadari kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data merupakan instrumen pengumpulan data yang belum terstandar. Namun demikian, peneliti sebelum penelitian telah berusaha menempuh prosedur penyusunan kuesioner yang benar agar diperoleh kuesioner yang memiliki validitas konstruk dan validitas empirisnya.

F. Daftar Pustaka

Arifin, Z. 1988. *Evaluasi Instruksional*. Bandung: Remaja Karya

Arikunto, S. 1998. *Manajemen Penelitian*. Yakarta: PT. Rineka Cipta

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2005. *Pedoman Evaluasi Diri Program Studi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

Dimyati, Mudjiono. 1999. *Belajar dan Pembelajar*. Jakarta: Pustaka Jaya

Ebel, R.L. 1969. *Encyclopedia of Educational Research*. Toronto: McMillan Co.

Gozhali, I. 2001. *Analisis Multivariate*. Semarang: Universitas Diponegoro

Gujarati, D N. 1995. *Basic Econometrics*. Singapore: McGraw-Hill Book Co.

Hurlock, E.B. 1990. *Psikologi Perkembangan* (terj.). Jakarta: Penerbit Erlangga http://www.pts. co.id/ pascaban.asp

Kartono, K. 1980. *Psikologi Umum*. Jakarta: Kosgoro

Kohler, H. 1985. *Statistics for Business and Economics*. England: Scott Foresman and Co.

Kompas, 4 Juni 2008

Loekmono, L. 1988. "Korelasi antara Indeks Prestasi Kumulatif Semester I/T.A. 1987/1988 dengan Masalah Yang Dialami Mahasiswa". *Laporan Penelitian*. Salatiga: Pusat Bimbingan Universitas Kristen Satya Wacana

Mukodim, D., Ritandiyono, Harumi Ratna Sita. 2004. "Peranan Kesepian dan Kecenderungan Internet Addiction Disorder Terhadap Prestasi Mahasiswa Universitas Guna Dharma". *Proceedings Komputer dan Sistem Intelejen (KOMMIT 2004)*. Universitas Guna Dharma Jakarta, 24-25 Agustus 2004

Myron, D.H. 1981. *Teaching for Learning*. Santa Monica: Goodyear Publishing Co.Inc.

Purwanto, N., 1990. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Karya

Sudjana. 1996. *Metoda Statistika*. Bandung: Penerbit Tarsito

Sudjana, N., Achmad Rivai. 2001. *Media Pengajaran*. Jakarta: Sinar Baru

Syah, M. 2002. *Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru*. Bandung: Rosda Karya

Tanlain, W. 2006. "Perkembangan Minat Terhadap Jabatan Guru dan Sikap-Kebiasaan Relajar Para Mahasiswa Angkatan 2004 D-2 PGSD, JIP, FKIP, Universitas Sanata Drama Yogyakarta". *Ringkasan Laporan Penelitian*. Disampaikan dalam Seminar Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 9 September 2006

Tjiptono, F. Gregorius Chandra. 2005. *Service, Quality & Satisfaction*. Yogyakarta: Andi Offset

Universitas Sanata Dharma. 2002. *Peraturan Akademik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*

Walgito, B. 1982. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya

Winkel, W.S. 1983. *Psikologi Bimbingan dan Evaluasi Belajar*. Jakarta: Gramedia

Winkel, W.S. 1991. *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Zeithaml, A.V., Leonard L. Berry. 1996. "The Behavioral Consequences of Service Quality". *Journal of Marketing*. Vol. 60 (April 1996). P. 31-46

BERBAGAI DIMENSI DALAM EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN

Yusef Widya Karsana[*)]

Abstract

The evaluation of business performance is very importance in the business community. Evaluation of performance will be meaningful if the purpose of any evaluation have been articulated clearly. This paper will suggesting a framework for evaluation which recognizes the perspectives of the parties and the various needs to performance evaluation. This framework provides a suitable starting-point for the construction of measures of performance which are appropriate for the purposes for which they will be used. An integrated measurement and reporting systems in an organization will lead to better performance of the organizations. These organizations will be more responsive to the challenge of external environment and will have its strategy and control fuctions more closely aligned with each other and with its ultimate objectives.

Keywords: business performance, evaluation framework, perspective of the parties, an integrated measurement and reporting systems.

A. Pendahuluan

Organisasi perusahaan merupakan tempat pertemuan berbagai pihak yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Di samping pemilik, banyak pihak lain ikut terlibat dalam perusahaan untuk mendukung kelancaran operasi perusahaan. Keterlibatan pihak-pihak tersebut bersifat langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak yang secara langsung berkepentingan terhadap perusahaan adalah para manajer, kreditur, investor. Sedangkan pihak-pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam operasi perusahaan adalah pemerintah, *customer*, dan masyarakat luas lainnya. Semakin besar skala bisnis, semakin banyak pihak-pihak yang akan terlibat di dalam perusahaan. Mengingat kepentingan mereka berbeda antara satu dengan lainnya, maka perlu ada cara yang berbeda dalam hal evaluasi kinerja perusahaan yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Penelitian-penelitian empiris dan perkembangan teoritis menunjukkan bahwa evaluasi kinerja bisnis memiliki arti yang semakin penting dan tetap menarik untuk dibahas. Evaluasi kinerja tidak hanya penting bagi masyarakat bisnis, tetapi juga untuk masyarakat luas (masyarakat awam

[*)] **Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si.** *adalah Staff Pengajar Prodi Akuntansi Universitas Sanata Dharma*

dan kalangan akademisi). Bagi masyarakat bisnis, evaluasi kinerja menunjukkan kemampuan sebuah bisnis untuk bertahan hidup. Sementara, kemampuan bertahan hidup tergantung pada kejelian unit bisnis memilih strategi yang akan memungkinkan bisnis mencapai kinerja sesuai dengan kriteria yang diharapkan.

Evaluasi kinerja bisnis tidak hanya berhubungan dengan masa lalu, tetapi juga masa depan. Orientasi masa depan berhubungan dengan pemilihan alternatif-alternatif strategis bisnis untuk memastikan kelangsungan hidup unit bisnis di masa yang akan datang. Evaluasi secara realistis terhadap kinerja bisnis dengan demikian sangat penting tidak hanya untuk para manajer bisnis maupun para pemilik bisnis, tetapi juga untuk masyarakat *stakeholder* dari bisnis tersebut secara keseluruhan.

Selama ini teknik-teknik untuk evaluasi kinerja secara luas terpusat pada teknik-teknik akuntansi. Dearden (1980), misalnya, menunjukkan beberapa kelemahan pemakaian *return on investment* (ROI) dalam menilai kinerja divisional. Ia menyarankan penggunaan *residual income* (RI) untuk mengatasi kekurangan dalam ROI. Berbeda pandangan dengan Dearden, Emanuel dan Outley (1986) justru mengkritik penggunaan RI sebagai alat untuk evaluasi kinerja divisional. Penggunaan RI menurut mereka akan mengabaikan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Beberapa pihak menyadari bahwa perspektif evaluasi telah mengalami pergeseran dari penekanan pada ukuran-ukuran finansial menuju ke penggunaan rentang ukuran yang lebih luas. Kaplan (1984) menyatakan bahwa penggunaan teknik *cost accounting* dalam akuntansi manajemen tidak lagi relevan karena perusahaan saat ini menghasilkan produk yang memiliki kandungan tenaga kerja yang sangat rendah. Penggunaan *profit* sebagai ukuran kinerja hanya mampu memotivasi manajer dalam jangka pendek. Karenanya, Kaplan (1992) terdorong untuk memperkenalkan konsep pengukuran kinerja baru yang disebut dengan *Balanced Scorecard*.

Pembahasan mengenai kesesuaian berbagai teknik evaluasi merupakan hal yang penting. Meskipun demikian, memahami argumen-argumen yang mendasari pemakaian suatu alat evaluasi merupakan hal yang tidak kalah penting untuk dibahas. Argumen-argumen tersebut umumnya berhubungan dengan tujuan pengukuran kinerja dan penentuan apa yang bisa dipertimbangkan sebagai indikator kinerja yang bagus. Tanpa mempertimbangkan permasalahan ini, evaluasi kinerja menjadi kurang relevan. Teknik-teknik evaluasi kinerja akan relevan dan bermanfaat jika dasar pemikiran mendasar yang menopang teknik evaluasi telah dapat diidentifikasi dengan jelas. Tulisan ini berusaha untuk membuat sintesa dan *framework* tentang konsep pengukuran evaluasi kinerja perusahaan disesuaikan dengan tujuan dilakukannya evaluasi dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengukuran-pengukuran tersebut.

B. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu: (1) alasan dilakukannya pengukuran, dan (2) apa yang harus diukur. Menurut Crowther (1996), pengukuran pada dasarnya adalah sebuah proses membandingkan, dan perbandingan merupakan tujuan untuk pengukuran. Beberapa pembandingan yang sering dilakukan dalam proses evaluasi kinerja adalah:

1. Secara temporer, dengan melakukan perbandingan satu periode waktu dengan periode waktu yang lain.
2. Secara geografis dengan melakukan perbandingan antara satu wilayah bisnis, sektor atau negara dengan yang lain.
3. Secara strategis yang memungkinkan untuk dilakukan berbagai pilihan tindakan alternatif dan proyeksi terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan untuk dibandingkan.

Kinerja tidaklah bersifat absolut melainkan komparatif. Sifat komparatif tersebut tampak pada hasil-hasil pengukuran, seperti: "lebih baik dari yang diperkirakan", "lebih buruk dari pesaing", dan sebagainya. Dengan demikian, pendekatan kuantitatif untuk evaluasi kinerja menjadi penting, meskipun pada beberapa aspek kinerja memiliki aspek kualitatif. Jauh lebih penting dari itu, dalam evaluasi kinerja perlu dilakukan identifikasi alasan-alasan atau tujuan evaluasi kinerja.

C. Tujuan Evaluasi

Evaluasi kinerja memiliki berbagai tujuan. Masing-masing tujuan berdiri sendiri sehingga setiap tujuan dapat diuji secara terpisah. Crowther (1996) mengidentifikasi adanya tiga tujuan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan bisnis, yaitu: evaluasi untuk pengendalian *(control)*, evaluasi untuk formulasi strategi *(planning)*, dan evaluasi untuk akuntabilitas *(accountability)*.

1. Evaluasi untuk pengendalian

Untuk melakukan pengendalian bisnis dan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya perusahaan saat ini, akuntansi merupakan alat kontrol melalui fungsinya sebagai pengukur dan mencatat kinerja perusahaan. Melalui catatan akuntansi, seorang manajer dapat menentukan apakah bisnis atau bagian bisnis telah bekerja seperti yang diharapkan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari seorang manajer. Untuk menentukan kriteria kinerja bisnis, terlebih dahulu harus ada rencana untuk aktivitas-aktivitas bisnis tersebut.

Evaluasi menjadi penting untuk pengendalian bisnis guna mengukur dan merencanakan kinerja dengan memperhatikan perubahan-perubahan pengendalian yang mungkin diperlukan untuk mengoreksi adanya penyimpangan tertentu dari rencana tersebut. Ukuran yang digunakan untuk tujuan ini harus sesuai dan bermakna untuk konteks di mana ukuran itu digunakan. Bidang akuntansi manajemen, khususnya, telah mengembangkan

model pengendalian proses-proses internal, aktivitas-aktivitas bisnis, dan evaluasi terhadap peluang-peluang internal yang mungkin dapat dicapai (Kaplan, R.S (1984). Sifat-sifat kuantitatif dari akuntansi membuat pengukuran komparatif kinerja menjadi sebuah proses yang relatif sederhana. Cherns (1978) mengemukakan bahwa pengukuran disamakan dengan pengendalian. Dengan demikian pengukuran memungkinkan dilakukan evaluasi dan pengendalian.

2. Evaluasi untuk Formulasi Strategi

Evaluasi untuk tujuan pengendalian berhubungan dengan data masa lalu dan implikasi-implikasi data itu di masa sekarang. Sedangkan evaluasi untuk tujuan formulasi strategi memiliki orientasi masa yang akan datang, yang didasarkan pada masa sekarang. Meskipun memperhitungkan data masa lalu, tetapi evaluasi untuk formulasi strategi cenderung berhubungan dengan prediksi-prediksi untuk masa yang akan datang.

Dalam mengembangkan strateginya, sebuah bisnis dihadapkan pada berbagai alternatif. Manajer bisnis harus memiliki alternatif-alternatif yang paling tepat sesuai dengan situasi dan keterbatasan (kendala) yang ada, tujuan masa depan, dan situasi lingkungan. Untuk memilih strategi yang tepat, perusahaan harus memiliki sarana untuk mengevaluasi alternatif-alternatif strategi yang dipandang tepat dan relevan seperti: keuntungan masa mendatang, kebutuhan sumber daya, pengaruh *stakeholde*r, pengaruh lingkungan, dan sebagainya.

Kriteria untuk mengevaluasi berbagai alternatif strategi sangat beragam dan secara individual berhubungan dengan setiap bisnis. Namun demikian, proses evaluasi melalui pengukuran dan prediksi, menjadi umum dilakukan. Di samping itu, karena pengukuran bisa dipandang sebagai inti dari evaluasi, maka menggunakan ukuran-ukuran yang tepat merupakan hal yang sangat penting. Ukuran-ukuran yang dikembangkan untuk formulasi strategi sangat mungkin berbeda dengan ukuran untuk tujuan pengendalian, dan juga untuk tujuan – tujuan yang lainnya. Jika ukuran-ukuran itu belum ada, maka harus dikembangkan terlebih dulu.

3. Evaluasi untuk Akuntabilitas

Akuntabilitas perusahaan bisnis ditujukan bagi pemilik dan juga pihak eksternal, yaitu para *stakeholder*. Sebuah bisnis yang beroperasi dalam lingkungan eksternal atau *stakeholder* akan selalu berubah dengan kecepatan perubahan yang semakin tinggi. Meskipun ini mempengaruhi tujuan evaluasi untuk formulasi strategi dan pengendalian, tetapi lingkungan eksternal ini lebih berhubungan dengan tujuan evaluasi akuntabilitas.

Kekuatan dan perhatian yang semakin besar dari semua *stakeholder* mendorong pengelolaan bisnis dituntut semakin akuntabel. Evaluasi kinerja perusahaan perlu berubah dengan

mengadopsi pendekatan *stakeholder*, bukan lagi pendekatan kepemilikan tradisional yang sempit. Perhatian aspek akuntabilitas menjadi semakin besar mengakibatkan penekanan lebih berat pada akuntansi sosial dan lingkungan, dan juga pada akuntabilitas perusahaan untuk para pekerjanya. Kebutuhan akan ukuran-ukuran yang tepat untuk mengevaluasi kinerja di dalam konteks yang lebih luas memerlukan penggunaan ukuran-ukuran kinerja baru, yang tidak selalu tepat untuk tujuan-tujuan evaluasi yang lain. Ukuran-ukuran semacam itu tidak selalu berbasis akuntansi dan bahkan tidak selalu bersifat kuantitatif, meskipun ukuran-ukuran semacam itu tetap harus memungkinkan dilakukan perbandingan. Namun demikian, pada saat yang sama, kebutuhan-kebutuhan akunta-bilitas kepemilikan tidak bisa diabaikan.

Harremans dkk. (1992) telah menekankan bahwa bila pengungkapan perusahaan dan evaluasi kinerja menggunakan pendekatan yang lebih luas, maka hal ini akan cenderung mengarah pada kinerja ekonomi yang lebih baik bagi sebuah organisasi. Dengan demikian akuntabilitas merupakan sebuah bidang kinerja yang semakin penting dan selalu mengalami perubahan, yang mencerminkan perubahan kebutuhan para *stakeholder*, sehingga memerlukan pengembangan ukuran-ukuran yang sesuai untuk evaluasi kinerja.

D. Pelaporan Kinerja

Dalam praktik, evaluasi kinerja tidak hanya tergantung pada pengukuran yang tepat terhadap kinerja namun juga pada pelaporan kinerja itu. Setiap kelompok orang atau *stakeholder* yang tertarik pada evaluasi kinerja sebuah perusahaan memerlukan sebuah laporan dalam bentuk tertentu untuk melakukan evaluasi. Kebutuhan akan informasi dari kelompok-kelompok ini akan berbeda-beda, tergantung pada ketertarikan dan perhatian mereka.

Kebutuhan pengendalian internal, kebutuhan para pemilik, kebutuhan para investor dan investor potensial semuanya akan berbeda satu dari yang lain, dan ini memunculkan masalah untuk pelaporan kinerja. Hal ini telah disadari oleh Birnberg (1990), yang mengemukakan bahwa sebuah perusahaan yang berusaha menyediakan informasi kepada berbagai kelompok yang beragam dengan menggunakan akuntansi akan gagal berkomunikasi secara memadai dengan semua kelompok-kelompok tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan komunitas *stakeholder* yang berbeda, diperlukan pertimbangan terhadap perspektif setiap *stakeholder* dan pertimbangan ketertarikan pada evaluasi kinerja organisasi bagi setiap *stakeholder*. Karena ketertarikan mereka berbeda-beda, maka hal ini tentunya akan mempertinggi kebutuhan pelaporan yang harus dihadapi oleh perusahaan.

E. Mengembangkan Sebuah Rerangka (*framework*) untuk Evaluasi Kinerja

Dengan mempertimbangkan berbagai tujuan evaluasi kinerja, maka

ukuran-ukuran yang sesuai untuk evaluasi tergantung pada tujuan dilakukannya evaluasi tersebut. Perspektif dan kebutuhan-kebutuhan individual yang berbeda dari semua anggota masyarakat *stakeholder* harus dipertimbangkan di dalam menentukan sistem pengukuran dan pelaporan yang memuaskan. Sistem yang gagal menangani semua kebutuhan akan mengakibatkan tidak memuaskan bagi beberapa kelompok *stakeholder* sehingga mereka ingin melakukan usaha untuk merubah sistem itu. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya pemborosan sumber daya perusahaan yang disebabkan oleh adanya konflik internal, yang selanjutnya dapat berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sebuah metode yang lebih efisien adalah metode yang mempertimbangkan semua kebutuhan sejak dari awal dan kemudian merancang sebuah kerangka kerja evaluasi yang memenuhi semua kebutuhan dan bisa diekspresikan sebagai sebuah sistem pengukuran dan pelaporan.

Penentuan kualitas kinerja akan tergantung pada perspektif orang yang mengevaluasi kinerja itu. Konsep para *stakeholder* adalah penting untuk penentuan perspektif itu. Kelompok-kelompok *stakeholder* yang berbeda cenderung memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda, sehingga mereka memiliki perspektif-perspektif yang berbeda tentang evaluasi kinerja. Di dalam mempertimbangkan para *stakeholder*, penting kiranya untuk mempertimbangkan definisi paling luas masyarakat *stakeholder*, karena semuanya memiliki kepentingan pada perspektif tentang perusahaan. Oleh karena itu, kebutuhan akan pelaporan juga akan mencakup kepada semua *stakeholder*, sehingga akuntabilitas perusahaan bukan hanya untuk pemiliknya sendiri, pelanggan dan pekerja namun juga untuk masyarakat luas, dan juga untuk konstituen-konstituen komunitas di masa yang akan datang. Dengan demikian perlu dipahami bahwa perusahaan bekerja pada level global dan akuntabel bukan hanya untuk perilaku sekarang melainkan juga perilakunya di masa lalu, karena masa mendatang adalah merupakan dampak dari perilaku masa lalu dan masa kini perusahaan, terutama ketika pengaruh lingkungan dipertimbangkan. Oleh karena itu organisasi, harus menaruh perhatian pada masa depan dan masa sekarang, tetapi juga tidak bisa mengabaikan masa lalu.

Analisis terhadap para *stakeholder* memungkinkan perspektif evaluasi kinerja dapat diidentifikasi dan dengan begitu menambahkan pengukuran lain pada evaluasi kinerja. Setiap orang bisa menjadi bagian lebih dari satu kelompok *stakeholder* sehingga bisa memiliki lebih dari satu ketertarikan pada kinerja perusahaan. Seorang manajer juga adalah seorang pekerja, seorang anggota masyarakat lokal dan bisa juga menjadi seorang pemegang saham dan seorang pelanggan perusahaan. Oleh karena itu, seseorang menjadi tertarik pada kinerja perusahaan dari beberapa perspektif yang berbeda.

Kebutuhan akan ukuran baru untuk melakukan evaluasi kinerja harus ditentukan dalam konteks lingkungan ekternal yang selalu mengalami perubahan, bersama-sama dengan perusahaan yang semakin menaruh perhatian pada budaya, pengembangan kompetensi, dan juga akuntabilitas. Hal ini telah berakibat pada kebutuhan untuk mengevaluasi kinerja dengan sejumlah kriteria yang beragam dan hal ini seringkali menimbulkan konflik.

F. Dimensi-dimensi dalam Kinerja Perusahaan

Crowther (1996) menyarankan pentingnya melihat tiga dimensi atau ukuran dalam sebuah sistem evaluasi kinerja, yaitu dimensi perspektif, dimensi tujuan dan dimensi fokus (Tabel 1).

1. Dimensi Perspektif

Dimensi ini didasarkan pada analisis tentang komunitas *stakeholder* yang luas dengan berusaha memahami bahwa *stakeholder* bisa memiliki lebih dari satu perspektif. Kelompok *stakeholder* yang berbeda bisa memiliki perspektif yang sama. Perspektif yang dimaksud adalah:

a. *Stewardship* atau kepengurusan. Hal ini didasarkan pada salah satu dari pandangan bahwa akuntansi tradisional berhubungan dengan pengamanan aset, dimana para manajer bisnis bertindak atas nama para pemilik bisnis.

b. *Ownership,* atau kepemilikan. Perspektif ini menunjukkan bahwa salah satu dari perhatian para pemilik bisnis dan berhubungan dengan nilai saham perusahaan.

c. *Stakeholder* atau para pihak yang memiliki kepentingan. Perspektif ini menunjukkan bahwa perusahaan terdiri dari kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda, yang masing-masing memiliki ketertarikan pada kinerja perusahaan. Oleh karena itu, *stakeholder* berhubungan dengan kekuatan berbagai kelompok dan

Tabel 1: Hubungan antara Perspektif dengan Konsep-Konsep yang Mendasarinya

Perspektif	Konsep
Stewardship atau kepengurusan	Pengamanan aset
Ownership atau kepemilikan	Nilai pemegang saham
Stakeholder	Kekuasaan dan akuntabilitas
Employee atau pekerja	Imbalan dan motivasi
*Environmenta*l atau lingkungan	Keberlangsungan *(sustainability)*
Sosial	Pengungkapan dan efek kemasyarakatan
Managerial	Formulasi strategi dan implementasi
Alokasi sumber daya	Perencanaan
Worldview, atau pandangan luas	Holism

akuntabilitas organisasi terhadap kelompok-kelompok itu.

d. *Pekerja*. Hal ini mencerminkan fakta bahwa pekerja tertarik pada kinerja perusahaan dan organisasi berhubungan dengan kinerja para pekerjanya di dalam membantu mencapai tujuan-tujuannya. Pekerja berhubungan dengan motivasi, dalam hubungannya dengan kinerja dan imbalan.

e. *Lingkungan*. Baik perusahaan maupun para *stakeholder* lain berhubungan dengan pengaruh organisasi pada lingkungan. Oleh karena itu, perspektif ini berhubungan dengan pengaruh perusahaan pada lingkungan di dalam pengertian permasalahan-permasalahan seperti polusi dan kesinambungan perusahaan.

f. *Sosial*. Sebuah perusahaan biasanya dipahami sebagai bagian dari masyarakat di mana perusahaan itu beroperasi. Perspektif ini berhubungan dengan perusahaan sebagai anggota komunitas dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga perlu diperhatikan sejauh mana pengungkapan pada level kemasyarakatan.

g. *Manajerial*. Para manajer sebuah bisnis memiliki ketertarikan pada bisnis. Sebagai manajer, mereka memiliki kepentingan-kepentingan yang terpisah dari yang lain, dimana mereka memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan kinerja bisnis di masa yang akan datang dan mempertahankan aset bisnis itu. Perspektif ini mencerminkan permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan individual/ personal dan juga dengan pemasalahan manajemen strategis.

h. *Alokasi sumber daya*. Sebuah perusahaan memiliki keterbatasan sumber daya yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan perusahaan. Rencana-rencana dan proyek-proyek yang berbeda bersaing untuk menggunakan sumber daya yang terbatas itu dan ketegangan yang terjadi harus dipecahkan. Oleh karena itu, perspektif itu berhubungan dengan perencanaan, penganggaran dan investasi modal.

i. *Worldview* atau pandangan dunia. Sebuah perusahaan bukan hanya sebagai jumlah dari unit-unit kerja, tetapi merupakan sebuah entitas lengkap, sehingga perspektif ini berhubungan dengan pandangan holistik organisasi sebagai sebuah entitas yang terus eksis di dalam lingkungannya.

Perspektif-perspektif yang berbeda tersebut di atas mencerminkan berbagai sudut pandang yang berbeda dari berbagai *stakeholder* dan masing-masing perspektif saling terkait. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa *stakeholder* yang sama akan memiliki beberapa perspektif yang berbeda. Setiap perspektif didasarkan pada konsep-konsep kunci yang digambarkan pada Tabel 1.

2. Dimensi Tujuan

Evaluasi kinerja dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga kebutuhan akan informasi dan ukuran yang digunakan dari setiap tujuan bisa berbeda. Beberapa tujuan atau maksud dilakukan evaluasi adalah:

a. *Formulasi strategi*. Salah satu tujuan evaluasi kinerja adalah merencanakan masa depan bisnis dan mengembangkan strategi. Tujuan ini mencerminkan perencanaan jangka panjang bagi bisnis.

b. *Implementasi strategi*. Strategi yang telah dikembangkan harus diterapkan. Hal ini mencerminkan penerjemahan formulasi strategi ke dalam perencanaan dan alokasi sumber daya diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

c. *Kontrol*. Salah satu dari tujuan utama evaluasi kinerja adalah pengendalian terhadap operasi-operasi perusahaan, memastikan bahwa apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan sesuai dengan rencana, dan sekaligus mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan.

d. *Akuntabilitas*. Salah satu tujuan evaluasi adalah untuk memungkinkan dilakukannya pelaporan kinerja untuk memastikan bahwa bisnis telah memenuhi tujuan *stakeholder* dengan melaporkan kinerja di masa lalu dan rencana di masa yang akan datang. Dengan demikian, akuntabilitas meliputi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perusahaan.

e. Penilaian *(valuation)*. Berbagai *stakeholder* tertarik pada nilai perusahaan. Para *stakeholder* itu meliputi para pemilik dan investor yang ada dan calon yang ingin menilai organisasi sesuai dengan kriteria yang relevan dengan kebutuhan mereka, seperti: penilaian aset, keberlangsungan usaha atau *going concern*.

f. *Legal*. Sebuah perusahaan bekerja di dalam sebuah kerangka legislatif kemasyarakatan. Salah satu tujuannya adalah mematuhi ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dan yang berhubungan dengan operasi perusahaan, seperti: pelaporan dan persyaratan akuntansi. Kerangka kerja semacam itu tidak hanya meliputi kerangka kerja legislatif negara di mana bisnis itu berada, tetapi juga kerangka kerja semua negara di mana bisnis itu melakukan aktivitasnya.

g. *Informatif: hubungan masyarakat*. Beberapa kebutuhan informasional berusaha untuk memenuhi kebutuhan kelompok kepentingan khusus dan berusaha untuk mempertinggi kesadaran perusahaan secara umum di dalam hal eksistensinya, bidang operasional, dan posisi lingkungan dan ekonomi secara umum. Oleh karena itu, tujuan ini dimaksudkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat dan *stakeholder* akan informasi yang berhubungan

dengan prestasi dan rencana untuk perusahaan.

h. *Informatif: calon pelanggan*. Semua perusahaan memiliki pelanggan dan harus menarik pelanggan baru. Oleh karena itu, tujuan tersebut sangat berhubungan dengan peningkatan kesadaran tentang kinerja perusahan dan rencana serta kemampuan di masa depan.

i. *Defensif: pertahanan*. Sebagian besar tujuan untuk evaluasi adalah positif dan sebagaian kecil lainnya bersifat defensif. Tujuan itu melibatkan kesadaran akan ancaman dari lingkungan eksternal (sebagai contoh, akuisisi, perubahan undang-undang), dan antisipasi terhadap kejadian-kejadian yang mungkin bisa terjadi atau yang bersifat kontinjensi (*contingent)*.

c. Dimensi Fokus

Ada tiga aspek yang berbeda untuk dimensi fokus, yaitu: dua fokus bersifat temporal dan satu fokus bersifat organisasional. Aspek temporal pertama berhubungan dengan kinerja organisasi di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Beberapa perspektif, misalnya *stewardship* atau kepengurusan, berhubungan dengan masa lalu. Perspektif yang lain, misalnya perspektif alokasi sumber daya, strategi untuk tujuan formulasi strategi, berhubungan dengan masa yang akan datang. Perspektif-perspektif yang lain bisa berhubungan sekaligus dengan masa lalu dan juga masa yang akan datang.

Aspek temporal kedua berhubungan dengan jangka pendek dan jangka panjang. Aspek temporal ini memiliki orientasi masa mendatang. Kinerja bisa dievaluasi secara berbeda sesuai dengan kedua kriteria dan tujuan evaluasinya. Tujuan evaluasi yang berbeda mendorong dilakukannya evaluasi dilakukan secara berbeda pada fokus yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Hal inilah yang berakibat adanya perbedaan yang signifikan pada perspektif manajerial dan kepemilikan.

Aspek ketiga dari dimensi fokus adalah dimensi pandangan internal dan eksternal perusahaan. Kedua pandangan bisa berbeda dalam hal tujuan dan perspektifnya. Untuk tujuan kontrol pandangan internal mendominasi, sementara untuk tujuan akuntabilitas pandangan eksternal menjadi sangat penting. Demikian juga, sebuah perspektif pekerja pada dasarnya bersifat internal, sementara perspektif lingkungan pada dasarnya bersifat ekternal. Fokus-fokus tersebut diringkas sebagai berikut:

1) internal versus eksternal;
2) jangka pendek versus jangka panjang;
3) masa lalu dan masa mendatang.

G. Matriks Dimensi Evaluasi Kinerja

Ketiga dimensi evaluasi kinerja memiliki arti penting untuk semua *stakeholder* di dalam proses evaluasi, tetapi pada setiap kategori di dalam

setiap dimensi hanya relevan untuk beberapa pihak. Setiap dimensi berinteraksi dengan dua dimensi yang lain. Interaksi-interaksi di antara ketiganya bisa dilihat di dalam bentuk matriks yang mencerminkan interaksi serta interdependensi mereka. Dengan demikian, sistem ini bersifat multidimensional. Tabel 2, 3, dan 4 merupakan gambaran sintesa interaksi diantara dimensi-dimensi evaluasi kinerja perusahaan.

Berdasarkan analisis berbagai faktor yang signifikan dalam evaluasi kinerja menunjukkan bahwa dapat dibuat kategori ke dalam tiga dimensi—perspektif, tujuan dan fokus. Masing-masing berinteraksi dengan kedua dimensi yang lain. Tabel 2 menunjukkan hubungan-hubungan di antara perspektif dan dimensi-dimensi fokus. Tabel 3 menunjukkan hubungan-hubungan di antara dimensi tujuan dan dimensi fokus. Sementara, Tabel 4 menunjukkan hubungan-hubungan di antara dimensi tujuan dan perspektif.

Analisis seperti yang digambarkan dalam matriks menunjukkan interaksi-interaksi di antara berbagai faktor yang terlibat di dalam evaluasi kinerja. Pemahaman tentang hal ini akan memungkinkan perusahaan merencanakan sistem pengukuran dan pelaporannya untuk mencakup kebutuhan-kebutuhan itu. Jika analisis semacam ini tidak dilakukan, maka perusahaan kemungkinan akan gagal memenuhi kebutuhan-kebutuhan informasional beberapa pihak atau akan mengembangkan sistem yang bersifat *ad hoc* dan ganda untuk pengukuran dan pelaporan, yang dapat menyebabkan terhamburkannya sumberdaya organisasional yang sangat bernilai.

Dengan melakukan analisis yang menyeluruh seperti digambarkan dalam matriks, organisasi menjadi mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan informasionalnya dan mengembangkan ukuran-ukuran yang tepat. Ukuran-ukuran semacam itu tidak terhindarkan dari berbagai kombinasi ukuran-ukuran kuantitatif, finansial, maupun non-finansial, tetapi tepat untuk kebutuhan evaluatif perusahaan dari berbagai bagian konstituennya. Mekanisme

Tabel 2: Interaksi antara Dimensi Perspektif dengan Dimensi Fokus

PERSPEKTIF	FOKUS			
	Past	*Future*	*Internal*	*External*
Stewardship	v		v	
Ownership	v	v		v
Stakeholder	v	v	v	v
Employee	v		v	
Environmental		v		v
Social		v		v
Managerial		v	v	v
Alokasi sumber daya	v	v	v	
Worldview	v	v	v	v

Tabel 3: Interaksi antara Dimensi Tujuan dengan Dimensi Fokus

TUJUAN	FOKUS			
	Internal	Eksternal	Jangka Pendek	Jangka Panjang
Strategy formulation	v	v	v	v
Strategy Implementation	v		v	
Control	v		v	
Accountability		v	v	
Valuation	v	v	v	
Legal	v	v	v	
Informative: PR		v	v	v
Informative: Prospective customers		v	v	
Defensive		v	v	v

Tabel 4: Interaksi antara Dimensi Tujuan dengan Dimensi Perspektif

TUJUAN	PERSPEKTIF								
	Steward ship	*Owner ship*	*Stake holder*	*Emplo yee*	*Environm ent*	*Social*	*Manajerial*	*Resource Allocation*	*World view*
Strategy formulation		v					v	v	v
Strategy Implementation						v	v	v	
Control	v			v			v	v	
Accountability	v	v	v		v				v
Valuation		v		v					
Legal	v		v		v	v			
Informative: PR			v		v	v			v
Informative: Perspective cutomers						v			v
Defensive		v				v			

pelaporan yang tepat juga bisa diidentifikasi, dan pengembangan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja komprehensif bisa dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan evaluasi perusahaan dan para *stake-holder*.

Pendekatan yang hanya bersifat parsial untuk mempertimbangkan evaluasi kinerja dapat menyebabkan penggunaan ukuran-ukuran yang tidak selalu sesuai dengan tujuan penggunaan ukuran itu. Pertimbangan salah satu aspek kinerja dan pengembangan ukuran pada salah satu bidang bisa mengarah pada perkembangan pada bidang itu, tetapi seringkali justru mengorbankan

kebutuhan-kebutuhan lain. Pendekatan yang bersifat parsial untuk evaluasi kinerja cenderung mengarah pada sistem pengukuran yang tidak efisien untuk memenuhi kebutuhan. Dengan sistem yang tidak efisien, ada kecenderungan bahwa mekanisme pelaporan akan menjadi tidak efisien, tidak lengkap, dan gagal untuk memenuhi semua kebutuhan akan pelaporan kinerja secara memadai.

Kerangka kerja yang dibangun untuk menerima semua kelompok kepentingan dan perspektif yang mereka pegang dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maksud atau tujuan dilakukan evaluasi kinerja menunjukkan pendekatan yang logis. Pengembangan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja yang mempertimbangkan kebutuhan semua pihak bahkan memberikan dasar pengauditan kinerja yang telah dilaporkan. Dengan memperhatikan bahwa kekuatan para *stakeholder* yang berubah dari waktu ke waktu, seperti: perubahan ekonomi, kondisi-kondisi sosial dan budaya, baik pada level lokal maupun global, pendekatan ini merupakan sarana untuk merespon kebutuhan dan mengantisipasi adanya kebutuhan-kebutuhan semacam itu. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih bersifat proaktif terhadap sistem pelaporan dan pengukuran dan cenderung mengarah pada pencapaian kinerja ekonomi yang lebih baik.

Ukuran-ukuran kinerja yang efisien bisa ditentukan jika tujuan pengukuran itu telah ditentukan sebelumnya. Pada tujuan pengukuran yang berbeda memerlukan ukuran-ukuran yang berbeda pula, meskipun ada beberapa ukuran dapat digunakan untuk lebih dari satu tujuan pengukuran. Kesalahan pengukuran atau penggunaan ukuran yang tidak sesuai dengan tujuan akan berdampak munculnya konflik dan kesalah-pahaman.

Kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dari berbagai pihak dalam proses evaluasi menyebabkan terjadinya ketegangan di dalam perusahaan karena dalam proses evaluasi dilakukan kontrol internal, formulasi strategi dan fungsi akuntabilitas, dan menghasilkan struktur pelaporan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Informasi mendasar yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini diturunkan dari data sumber yang sama, tetapi cara data itu dianalisis dan digunakan adalah berbeda. Hal inilah yang dapat memunculkan konflik di dalam perusahaan.

Sumber konflik di dalam perusahaan disebabkan para *stake-holder* yang berbeda yang berusaha untuk mengakses dan menggunakan informasi secara berbeda. Konflik cenderung memiliki pengaruh disfungsional pada kepaduan organi-sasional dan akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan. Konflik di dalam perusahaan akan bertambah buruk ketika ukuran hanya disesuaikan untuk satu kebutuhan tertentu. Hal demikian disebabkan fokus terhadap tujuan tertentu cenderung memperburuk pencapaian tujuan lainnya. Sistem akuntansi dan sistem informasi memang dirancang umumnya untuk

memenuhi/menyesuaikan kebutuhan baru diidentifikasi. Tetapi, sistem tersebut di dalam perusahaan berada dalam keadaan konstan dalam hal perkembangannya.

H. Kesimpulan

Sebuah sistem pengukuran dan pelaporan yang terintegrasi di dalam sebuah organisasi akan mengarah pada kinerja yang lebih baik bagi organisasi tersebut. Sistem pengukuran dan pelaporan yang terintegrasi dapat mengurangi ketegangan (konflik) di dalam perusahaan. Perusahaan yang memiliki sistem pengukuran dan pelaporaran yang terintegrasi akan menjadi lebih peka terhadap tantangan lingkungan eksternal dan akan memiliki strategi serta fungsi kontrol yang lebih sejalan dengan tujuan-tujuan akhirnya. Pendekatan terintegrasi ini juga cenderung memiliki implikasi-implikasi positif bagi perusahaan, yaitu dapat meminimumkan ketegangan yang mungkin muncul serta mengarah pada pendekatan yang lebih bersifat konsensus yang akan lebih mengefektifkan fungsi kontrol dan perencanaan strategis.

Mekanisme pengukuran dan evaluasi merupakan sistem netral dan memiliki peran yang sangat positif di dalam membentuk budaya organisasi. Oleh karena itu, budaya perusahaan sampai pada batas tertentu tergantung pada mekanisme pengukuran dan evaluasi. Kualitas kinerja harus dipahami oleh evaluator dan pengukur sesuai dengan kriteria yang telah dipertimbangkan dengan tepat sesuai tujuannya, bukan hanya persepsi kualitas yang bersifat absolut. Salah satu faktor penting di dalam evaluasi kinerja adalah konsep *sustainability* yang memperhatikan kinerja. Oleh karena itu, semua *stakeholder* harus mampu mencari tahu secara pasti atau paling tidak memproyeksikan, bukan hanya kinerja sekarang melainkan juga implikasi-implikasinya untuk masa yang akan datang karena setiap evaluasi kinerja harus selalu memiliki orientasi ke masa depan.

Ukuran-ukuran yang tepat yang dikembangkan dengan menggunakan *framework* atau rerangka kerja cenderung memungkinkan proyeksi yang lebih baik tentang keberlanjutan level-level kinerja di masa depan dengan mempertimbangkan kinerja sekarang. Kebutuhan semua *stakeholder* cenderung menunjukkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi kinerja di masa mendatang dibandingkan evaluasi kinerja menggunakan pendekatan yang lebih tradisional. Sebagai sebuah contoh adalah perlunya memperhatikan sampai sejauh mana bahan baku yang berasal dari sumber alam bisa diperbaharui. Hal ini sekarang telah menjadi masalah penting bagi banyak industri. Jika masalah ini tidak dipertimbangkan, maka akhirnya perusahaan banyak mendapat tekanan yang berasal dari masyarakat dan kelompok-kelompok lingkungan, bukan lagi hanya oleh para *stakeholder* perusahaan. Kerangka kerja yang dipaparkan di atas dapat berlaku secara umum untuk semua perusahaan, baik perusahaan publik maupun swasta,

pencari laba atau nirlaba, nasional ataupun multinasional.

Daftar Pustaka

Birnbeg. 1990. "The Role of Accounting in Financial Disclosure". *Accounting, Organization and Society.* Vol 5 No 1: 71 - 80.

Cherns, A.B., 1978. "Alienation and Accountancy". *Accounting, Organization and Society.* Vol 3 No.2: 105-14.

Crowther, D. 1996. "From the Foundation Upwards: Evaluating Business Performance". *Managerial Auditing Journal*. 11/8: 4-13.

Crowther, David. 1996. "Corporate Performance Operates in Three Dimensions". *Managerial Auditing Journal*. 11/8: 4-13.

Dearden, J., 1980. "The Case Against ROI Control". *Harvard Business Review*. Vol. 47 No.3: 124-35

Emmanuel, C.R. and Otley, D.T., 1986. "The usefulness of Residual Income". *Journal of Business Finance & Accounting*. Vol. 3 No. 4: 43-51

Kaplan, R.S. 1984. "The Evolution of Management Accounting". *The Accounting Review. Vol. LIX No. 3: 390 – 418.*

Kaplan, R.S., and Norton, D.P. 1992. "The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance". *Harvard Business Review.* January-February: 71 – 79.

Herremans, I.M., Akathaparn, P., and MCInnes, M. 1992. "An Investigation of Corporate Social Responsibility, Reputation, and Economic Performance". *Accounting, Organization and Society.* Vol 18 No.7: 587 - 604.

PENGENAAN PAJAK BAGI BADAN USAHA PENDIDIKAN

Bambang Purnomo*)*

Abstract

As the consequence of the implementation of Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan *2007 article number 28, and* Undang-undang Pajak Penghasilan *2008 article number 36, an education institution must be an education entity that can be in a form of state-owned education institution, local state-owned education institution, and private education institution. These three kinds of education institutions are subject to tax based on the rule law. An education institution may not become subject to tax because of a number of conditions, namely: (1) The establishment is based on the legal law; (2) Its expenses are funded by the state or local state; (3) Its income is owned by the state or local state; and (4) The Income Statement is audited by the government auditor. The education entity that meets these four criteria is usually either state-owned or local state-owned education institution. Whereas, the education institution that does not meet those criteria is subject to tax. In the meantime, although the state-owned and local-state-owned education institutions are not subject to tax, the tax obligations that are related with salaries and the other expenses must be fulfilled and these are executed by the treasurers of the institutions. The education entity that is automatically subject to tax is the private education institution, because it possesses the objects of tax, namely, the earning that comes from the surplus of the operational activities as a private education institution. As the tax obligator, an education institution must fulfill the tax obligation activities, such as paying and reporting the tax. The state-owned and local state-owned education institutions have the tax obligations of the income tax, articles 21, 22 and 23 that are executed by the treasurers of the institutions. Whereas, the private education institutions have the tax obligations of the income tax, articles 21, 23, 25, and 29.*

Kata kunci: *Income tax, state education institution, private education institution*

A. Pendahuluan

Undang Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) telah diundangkan dan disahkan oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjelang tutup tahun 2008, dan pada periode yang

) ***Drs. Bambang Purnomo, S.E., M.Si.*** *adalah staf pengajar Program Studi Pendidikan Akuntansi USD*

sama telah diberlakukan Undang-Undang Pajak No 36 tahun 2008 sebagai perubahan yang ke empat atas Undang-Undang No 7 tahun 1983 yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2009. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini sebagai hukum material yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 yang merupakan hukum formal yang secara efektif berlaku mulai tahun 2008. Di samping itu pemerintah juga menerbitkan kebijakan dalam hal pengampunan pajak melalui *sunset policy* yang berisi tentang pengampunan pajak atas denda administrasi dan bunga dan beberapa aturan lain yang menyertainya yang batas waktunya sampai dengan tanggal 28 Februari 2009. Sejak pemberlakukan Undang-Undang Pajak No 10 tahun 1994, pengenaan pajak bagi lembaga pendidikan sudah dilakukan, yaitu melalui Surat Keputusan Dirjen Pajak No 87/PJ/95, bahwa selisih lebih merupakan objek pajak dimana selisih lebih dapat digunakan sebagai dana pembangunan sarana dan prasarana. Pada Undang Undang Pajak No 36 tahun 2008 pengenaan pajak bagi lembaga pendidikan lebih dipertegas.

Terkait dengan keberadaan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang ditetapkan pada 17 Desember 2008 oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam konsiderannya bahwa Undang-Undang tersebut adalah perwujudan dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang perlunya membentuk Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan. Tujuan dibuatnya Undang-Undang BHP ini adalah untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, diperlukan otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/ madrasah pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi. Otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dapat diwujudkan jika penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan, yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Pada pasal 4 ayat 1 UU BHP dinyatakan bahwa dalam pengelolaan dana secara mandiri dan berdasarkan prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya bukan mencari sisa lebih, sehingga apabila timbul sisa lebih hasil usaha dari kegiatan BHP, maka seluruh sisa lebih hasil kegiatan tersebut harus ditanamkan kembali ke dalam BHP untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. Pada bab IV pasal 31 dijelaskan bahwa kekayaan pendiri terpisah dengan dengan kekayaan BHP, seluruh penerimaan pendapataan dan sisa lebih dari kegiatan menjadi milik BHP. Pada pasal 43 ayat 1 UU BHP diisyaratkan bahwa laporan keuangan tahunan BHP, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan BHP, disusun mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Pengertian sisa

lebih atau dapat juga dikatakan laba pada setiap penyelenggaraan satuan pendidikan yang apabila merujuk undang undang pajak merupakan tambahan ekonomis yang dapat untuk konsumsi dan menambah kekayaan. Dengan memperhatikan berbagai pasal ada indikasi bahwa BHP merupakan suatu unit entitas (perusahaan) yang tidak berbeda dengan perusahaan komersial lainnya, hanya saja telah ditegaskan bahwa walaupun gerak operasinya seperti usaha bisnis, namun prinsip nirlaba menjadi hal yang pokok secara ekonomi

Dengan diberlakukannya Undang Undang Badan Hukum Pendidikan, penyelenggaraan satuan pendidikan harus berbentuk BHP yang bila dipandang dari Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 3b merupakan subjek pajak badan yang mempunyai kewajiban kewajiban menurut aturan perpajakan yang berlaku. Namun menurut anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah, di sela semiloka "Tata Kelola Perguruan Tinggi dalam Rangka Menuju Kemandirian dan Akuntabilitas" pada tanggal 22 Agustus 2007 di Universitas Diponegoro Semarang yang dikutip oleh Lampung Pos 23 Agustus 2007 bahwa BHP bukan subjek pajak. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang Undang Pajak No 36 tahun 2008 bahwa yang termasuk objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.Dalam pengelolaan operasinya, BHP bisa memperoleh sisa lebih. Sisa lebih ini dapat diartikan penghasilan, sehingga sebagai BHP memiliki objek pajak yang dapat dikenai pajak sesuai aturan yang berlaku. Demikian pula ketika satuan pendidikan memberikan penghasilan pada pelaksana pendidikan juga merupakan objek pajak. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas yang menjadi pertanyaan dan permasalahan adalah 1) apakah BHP itu adalah subjek pajak atau bukan subjek pajak dan 2) kewajiban-kewajiban apa saja yang terkait dengan perpajakan suatu satuan pendidikan baik Badan Hukum Pendidikan Pemerintah, Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah maupun Badan Hukum Pendidikan Masyarakat.

B. Badan Hukum Pendidikan.

1. Jenis Badan Hukum

Menurut Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan pada pasal 6 ayat 2,3 dan 4 disebutkan bahwa Badan Hukum Pendidikan adalah:

a. BHP penyelenggara merupakan jenis BHP yang didirikan oleh penyelenggara pendidikan yang mengelola satu atau lebih satuan pendidikan formal, misalnya memiliki berbagai macam sekolah dari pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi.
b. BHP satuan pendidikan merupakan jenis BHP yang didirikan oleh satuan pendidikan yang mengelola satu satuan pendidikan formal.

c. BHP penyelenggara dan satuan pendidikan merupakan jenis BHP yang didirikan oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang mengelola satu atau lebih satuan pendidikan formal yang berbadan hukum.

2. Bentuk Badan Hukum

Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal yang terdiri atas Badan Hukum Pendidikan Pemerintah, Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah, dan Badan Hukum Pendidikan Masyarakat.

Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPP adalah BHP yang didirikan oleh pemerintah. Dasar pendiriannya dari peraturan pemerintah. Badan Hukum Pendidikan ini merupakan Badan Hukum Pendidikan milik pemerintah, misalnya perguruan tinggi negeri yang bernaung pada instansi pemerintah pusat dan ditetapkan oleh presiden.

Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah atau BHPPD adalah BHP yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, dasar pendiriannya adalah peraturan pemerintah daerah dan ditetapkan oleh gubernur, bupati, walikota sesuai kewenangannya masing-masing.

Badan Hukum Pendidikan Masyarakat atau BHPM adalah BHP yang didirikan oleh masyarakat (BHPM). Dasar pendiriannya adalah akte notaris, dan disahkan oleh Menteri. BHPM ini merupakan BHP yang penyelenggara dan kepemilikannya oleh swasta.

3. Pendapatan dan Biaya BHP

Badan Usaha Pendidikan ditinjau dari sisi ekonomi merupakan lembaga atau organisasi bersifat *non profit oriented* (nirlaba), artinya organisasi ini tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) yang membutuhkannya, seperti pendidikan, kesehatan. Namun dalam mengelola keuangannya harus efisien, artinya dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal. Sumber pendanaan pendidikan formal yang diselenggarakan BHP menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. UU BHP Bab V, pasal 33, ayat 1, 2 dan 3 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dana pendidikan. Pada undang-undang yang sama dalam pasal 34 ayat 1 disiratkan pemerintah dan pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPPD dalam menyelenggarakan pendidikan dasar untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Penerimaan pendapatan BHP sesuai dengan pasal 34 UU BHP berasal dari pemerintah, pemerintah daerah dan peserta didik. Pemerintah dan pemerintah daerah dengan menanggung sekurang-kurangnya dua per tiga biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan

pendidikan mene-ngah untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada BHPP berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Pemerintah menanggung sekurang-kurangnya dua per tiga biaya pendidikan untuk BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada BHPP sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Peserta didik dapat ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuan-nya, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayai. BHPP atau BHPPD sebanyak-banyaknya satu per tiga dari seluruh biaya operasional.

Sumber pendapatan lain adalah dari usaha yang dilakukan oleh badan hukum pendidikan yang dapat memiliki badan usaha berbentuk badan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memperoleh laba. Seluruh laba dapat digunakan untuk memajukan satuan pendidikan dan memberi pelayanan kepada peserta didik (pasal 35 ayat 1 dan 2). Dengan demikian dapat dikatakan sumber pembiayaan Badan Hukum Pendidikan berasal dari, pemerintah, sumbangan para donatur, iuran siswa atau mahasiswa.

4. Penghasilan Badan Usaha Pendidikan

Penghasilan Badan Hukum Pendidikan terdiri atas sisa lebih dan laba usaha. Sisa lebih, yaitu selisih antara realisasi penerimaan dengan realisasi pengeluaran yang sebelumnya dituangkan dalam anggaran organisasi. Pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang BHP dikatakan bahwa pendanaan pendidikan formal yang diselenggara-kan BHP menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, hal ini berarti ada sebagian pendapatan yang masuk pada BHP selain dari pemerintah, sedangkan sisa lebih berasal dari seluruh penerimaan dikurangi biaya operasional.

Laba usaha dari badan usaha milik Badan Usaha Pendidikan. Penyeleng-garaan badan usaha ini tentunya yang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan. Misalnya sebuah perguruan tinggi menjual jasa laboratorium dan jasa penelitian.

C. Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP)

Masalah perpajakan di Indonesia diatur dengan undang-undang yang terdiri atas Undang-Undang ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Undang-Undang Bea Hak atas Perolehan Tanah dan Bangunan, serta Undang-Undang Bea Meterai. Untuk Undang-Undang KUP yang digunakan adalah Undang-Undang KUP No 28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ke-3 atas Undang-Undang KUP tahun 1983,

Undang-Undang Pajak Penghasilan yang digunakan adalah Undang-Undang Pajak No 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan Undang-Undang Pajak tahun 1983. Dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut dalam pelaksaannya disertai berbagai aturan yang diatur melalui SK Menteri Keuangan, SK DitJen Pajak, Peraturan Pemerintah dan berbagai surat edaran dari instansi terkait. Undang-Undang KUP berisi tentang tata cara administrasi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1. Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Pada KUP ini yang terkait dengan Badan Usaha Pendidikan adalah sebagai berikut.

a. Pengertian Badan

Pada Undang-Undang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan, badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan Usaha Pendidikan pada pengertian ini tersirat dalam "bentuk badan lainnya", artinya Badan Usaha Pendidikan termasuk dalam pengertian tersebut.

b. Kewajiban memiliki NPWP

Bentuk Badan Usaha Pendidikan yang sudah jelas merupakan organisasi yang berusaha di bidang pendidikan, kepemilikian NPWP tergantung pada bentuk BHP. Untuk BHPM sudah dengan sendirinya sebagai badan milik masyarakat sudah selayaknya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan pasal 2, ayat 1 Undang-Undang KUP No 28 tahun 2007. Namun pada BHPP dan BHPPD harus dilihat apakah BHP tersebut memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak dan objek pajaknya. Bila kedua unsur tadi terpenuhi wajib memiliki NPWP, yang selanjutnya kewajiban-kewajiban pajaknya harus dilakukan.

c. Kewajiban Memotong Pajak

Dalam Undang-Undang KUP No 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 2, tentang definisi wajib pajak, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. BHP sebagai organisasi yang dalam aktivitasnya melakukan pembayaran gaji atas karyawannya ada kewajiban memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 252 tertanggal 31 Desember 2008, bahwa pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh

Pasal 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan

d. Kewajiban Membayar Pajak

Kewajiban membayar pajak ini berlaku untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan dan atas penghasilan tersebut dikenai pajak atau karena sebagai wajib pajak telah melakukan pemotongan atas pembayaran penghasilan kepada orang lain. Hasil pemotongan harus disetorkan ke Ditjen Pajak. Pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang KUP dinyatakan bahwa menteri keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Hal ini berlaku untuk pembayaran pajak masa atau bulanan. Sedangkan untuk pembayaran pajak tahunan yang merupakan kekurangan pembayaran pajak dilakukan sebelum melaporkan surat pemberitahuan tahunan. Apabila pada tanggal jatuh tempo kewajiban pajak belum dibayar akan dikenai sanksi administrasi berupa denda bunga 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.

e. Kewajiban Melaporkan Pajak

Pajak-pajak yang telah dibayar dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan ada 2 jenis, yaitu SPT Masa untuk melaporkan kewajiban pajak yang telah dibayar pada setiap masa atau bulan dan SPT Tahunan untuk melaporkan kewajiban pajak selama satu tahun pajak. Batas waktu penyampaian pelaporan:

1) untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak;
2) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak; atau
3) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

f. Kewajiban Membuat Pembukuan

Setiap wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan (pasal 28 ayat 1). Adapun aturan aturan dalam pembukuan adalah sebagai berikut.

1) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau

kegiatan usaha yang sebenarnya.

2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh menteri keuangan.
3) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan *stelsel* akrual atau *stelsel* kas.
4) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
5) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
6) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin menteri keuangan.
7) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final
8) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan.

Aturan tersebut di atas untuk menciptakan suatu sistem akuntansi yang dapat memberikan informasi lebih memadai dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan bias dari keraguan bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak sebagai hukum pajak material mengatur tentang norma-norma yang menerangkan keadaan, kejadian, perbuatan hukum dan atau transaksi yang menyebabkan seseorang atau badan harus membayar pajak (objek pajak). Di samping itu hukum pajak material mengatur tentang siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak) berapa besarnya pajak yang dikenakan (tarif pajak), dasar pengenaan pajak, saat terutang, tempat terutang segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Undang-Undang Pajak No 36 Tahun 2008

merupakan perubahan ke-4 atas Undang-Undang pajak tahun 1983, mengatur tentang subjek pajak dan objek pajak. Dalam undang undang tersebut terkait dengan Badan Hukum Pendidikan adalah aturan aturan tentang subjek pajak, objek pajak penghasilan, pengecualian objek pajak, jenis-jenis pajak penghasilan.

a. Subjek Pajak

Subjek pajak dapat dibedakan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri tediri atas Subjek Pajak Orang Pribadi, Subjek Pajak Badan, Warisan.

Subjek Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sebagai subjek pajak akan menjadi wajib pajak bila jumlah penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wajib pajak perlu mendaftarkan NPWP. Ini berarti setiap penerima penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP wajib memiliki NPWP, termasuk guru- guru yang bekerja pada Badan Hukum Pendidikan dan yang telah memenuhi syarat diwajibkan memenuhi kewajibannya dengan terlebih dulu mendaftarkan untuk memperoleh NPWP.

Subjek Pajak Badan adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Badan Hukum Pendidikan yang berbentuk BHPM sepenuhnya merupakan subjek pajak, karena kriteria memperoleh penghasilan terpenuhi. Sedangkan Badan Hukum Pendidikan Pemeritah, sepanjang seluruh pendanaannya dari APBN atau APBD maka BHP tersebut bukan subjek pajak. Hal ini merujuk pada pasal 34 ayat 1, yang menyatakan katakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPPD dalam menyelenggarakan pendidikan dasar untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan. Dengan demikian dalam hal BHPP dan BHPPD tidak memungut sedikitpun dari siswanya dan tidak termasuk subjek pajak alasannya telah dikecualikan sebagai subjek pajak, sesuai pasal 2 ayat 3b item 2 Undang-Undang Pajak no 36 tahun 2008. Namun bagi BHPP dan BHPPD yang dalam pendanaannya tidak hanya dari APBN, tetapi juga dari masyarakat, dengan sendirinya

merupakan subjek pajak karena telah menerima penghasilan dari masyarakat.

b. Objek Pajak

Objek pajak pada pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri, baik penghasilan yang diterima oleh badan maupun penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Pengertian penghasilan menurut undang-undang ini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pengertian penghasilan ini dapat dikelompokkan menjadi: 1) penghasilan dari pekerjaan; 2) penghasilan dari keuntungan usaha, termasuk sisa usaha BHP yang tidak dibelanjakan dalam kurun waktu 4 tahun, surplus Bank Indonesia, laba atas pengalihan harta, hasil usaha yang berbasis syariah; 3) penghasilan berasal dari penggunaan harta, termasuk sewa, bunga, royalty; 4) penghasilan yang berasal dari usaha bebas

c. Pengecualian Objek Pajak

Pada dasarnya pengecualian objek pajak adalah penerimaan penghasilan yang tidak dikenai pajak. Pada Undang-Undang No 36 tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009, terdapat tambahan pengecualian. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak menurut pasal 4 ayat 3 a 1 adalah meliputi: 1) sumbangan karena kewajiban keagamaan seperti zakat baik yang diterima atau dibayar oleh badan ataupun orang pribadi; 2) hibah dari keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, atau yang diterima badan pendidikan, badan keagamaan, pengusaha mikro; 3) imbalan dalam bentuk natura; 4) deviden yang diterima oleh badan sebagai pemilik mayoritas; 5) bagian laba persero komanditer; 6) sisa lebih dari usaha pendidikan yang ditanam kembali dalam kurun waktu 4 tahun; 7) dan lain lain sesuai yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008. Perluasan pengecualian objek pajak meliputi: zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, *inter corporate dividend,* beasiswa, bagian laba unit penyertaan KIK,sisa lebih lembaga nirlaba di bidang pendidikan dan bidang penelitian dan pengembangan yang dapat ditanamkan kembali untuk masa 4 tahun yang tidak kena pajak merupakan penegasan kembali melalui keputusan Dirjen Pajak No Kep 87/PJ/95. Dengan demikian sisa lebih dari usaha pendidikan ini telah mempunyai kekuatan hukum, karena telah tersirat dalam Undang-Undang Pajak No 36 tahun 2008.

d. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Jenis-jenis pajak penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Pajak yang terkait dengan kewajiban perpajakan bagi Badan Hukum

Pendidikan, terdiri atas:

1) PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi,
2) PPPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak luar negeri. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi ,
3) PPh Pasal 22, adalah PPh yang dipungut oleh:
   a) Bendaharawan pemerintah pusat/daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
   b) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

   Pemungut PPh pasal 22 diantaranya adalah: direktorat jenderal anggaran, bendaharawan pemerintah pusat/daerah,yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
4) PPh Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pada Undang-Undang Pajak No 36. Pemotong pajak PPh pasal 23 diantaranya adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, dan penyelenggara kegiatan.

D. Kewajiban Perpajakan bagi Penyelenggara Satuan Pendidikan

1. BHPP dan BHPPD yang Dikecualikan sebagai Subjek Pajak

BHPP dan BHPPD yang dikecualikan sebagai subjek pajak harus memliki persyaratan sebagai berikut: a) lembaga yang dimaksud dibentuk dengan undang-undang sehingga operasionalnya dibiayai oleh APBN, b) lembaga yang hasil operasionalnya

masuk ke dalam APBN sebagai penerimaan negara, c) lembaga yang pembukuannya diperiksa oleh aparat negara, d) lembaga yang setiap anggaran belanja atau pengeluarannya harus dilakukan melalui daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Untuk BHP yang bukan subjek pajak kewajiban melakukan perpajakan dilakukan oleh bendaharawan BHPP dan BHPPD tersebut yang pejabatnya ditunjuk oleh menteri keuangan untuk BHPP dan oleh gubernur, bupati untuk BHPPD. Kewajiban perpajakan bagi Bendaharawan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 251/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 yang mengatur tentang kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak bagi wajib pajak termasuk bendaharawan dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Kewajiban terhadap PPh pasal 21.
   1) Membuat penghitungan atas pajak yang akan dipotong atas pembayaran honorarium, upah dan imbalan lain kepada penerima penghasilan.
   2) Melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji, upah, imbalan lain yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.
   3) Membuat dan memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan.
   4) Melakukan penyetoran atas uang hasil pemotongan ke bank persepsi/bank pos selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak tempat bendaharawan terdaftar selambat-lambatnya dua puluh hari setelah masa pajak berakhir.
   5) Wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Kewajiban terhadap PPh Pasal 22.
   1) Wajib memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara
   2) Pada hari yang sama menyetor hasil pungutan ke bank persepsi/bank pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh bendaharawan.
   3) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh pasal 22 belanja negara ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak tempat bendaharawan terdaftar selambat-lambatnya empat belas hari setelah masa pajak berakhir;

c. Kewajiban sebagai pemungut PPN dan PPn BM.

1) Memungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah atas pembayaran penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara.
2) Menyetor hasil pemungutannya ke Bank persepsi/bank pos selambat-lambatnya tanggal tujuh bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
3) Melaporkan hasil pemungutannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak tempat bendaharawan terdaftar selambat-lambatnya empat belas hari setelah masa pajak berakhir.

2. BHP sebagai Subjek Pajak

Badan Hukum Pendidikan yang secara yuridis langsung menjadi subjek pajak adalah BHPM, karena semua pembiayaan dilakukan dengan cara mencari dana secara mandiri, dan bantuan pemerintah. BHP yang sudah menyatakan diri sebagai subjek pajak bentuknya BHPnya juga dapat dari BHPP maupun dari BHPPD.

Kewajiban yang harus dilakukan selain memiliki NPWP adalah melakukan kewajiban sebagai berikut.

a. Kewajiban terhadap PPh pasal 21 sesuai surat keputusan menteri keuangan NOMOR 252/PMK.03/2008, yaitu:
   1) membuat penghitungan atas pajak yang akan dipotong atas pembayaran honorarium, upah dan imbalan lain kepada penerima penghasilan,
   2) melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji, upah, imbalan lain yang dibayarkan kepada penerima penghasilan,
   3) membuat dan memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan,
   4) melakukan penyetoran atas uang hasil pemotongan ke bank persepsi/bank pos selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak tempat bendaharawan terdaftar selambat-lambatnya dua puluh hari setelah masa pajak berakhir,
   5) wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Kewajiban terhadap PPh pasal 23, yaitu:
   1) melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas pembayaran jasa selain yang telah dipotong PPH pasal 21 seperti yang diatur dalam surat keputusan menteri keuangan NOMOR 244/PMK.03/2008,

2) memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan,
3) melakukan penyetoran atas PPh pasal 23 yang telah dipotong ke kas negara atau ke bank persepsi selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya,
4) melakukan pelaporan PPh pasal 23, selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan berikutnya.

c. Kewajiban membuat pembukuan. Wajib membuat pembukuan sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang KUP No 28 tahun 2007, dalam rangka menyusun laporan keuangan.

d. Menyusun laporan SPT Tahunan badan dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya pada bulan ke 4 tahun takwim berikutnya.

E. Sanksi sanksi

Sanksi sanksi bila wajib pajak tidak melakukan kewajibannya, mulai dari memiliki NPWP, memotong pajak, membayar dan melaporkan pajak, berupa denda administrasi, bunga atas pajak yang belum dibayar, dan dapat juga berupa sanksi penjara. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 28 tahun 2007 sebagai perubahan ke-3 atas Undang-Undang KUP tahun 1983.

F. Penutup

Badan Hukum Pendidikan bukan sebagai wajib pajak bila tidak terpenuhi sebagai subjek pajak yang mana kriteria bukan sebagai subjek pajak bila: 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. BHP yang seperti ini biasanya dari Badan Hukum Pendidikan Pemerintah dan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah, sedangkan yang tidak memenuhi ke-4 kriteria tersebut termasuk subjek pajak dan sekaligus menjadi wajib pajak. Walaupun BHPP dan BHPPD bukan sebagai subjek pajak, kewajiban perpajakan terkait dengan pembayaran gaji, belanja yang dibiayai APBN/APBD dilaksanakan oleh Bendaharawan BHPP dan Bendaharawan BHPPD. Sedangkan BHP yang langsung menjadi subjek pajak adalah Badan Hukum Pendidikan Masyarakat, yang secara otomatis menjadi wajib pajak karena memenuhi adanya objek pajak, yaitu penghasilan yang berasal dari sisa lebih atas aktivitas operasinya sebagai satuan pendidikan. Dengan terpenuhinya BHP sebagai wajib pajak menimbulkan adanya berbagai kewajiban perpajakan mulai dari memotong pajak, membayar pajak,

menyetor pajak dan melaporkan pajak yang dibayar.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan No 28 tahun 2007.

Undang-Undang Pajak Penghasilan No 38 tahun 2008

Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Tahun 2008

Surat Keputusan Dirjen Pajak No. 87/ PJ/95,

Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 244/ 2008

Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 252/ 2008

Surat Kepeutusan Menteri Keuangan No. 251/KMK.04/1995

Perancangan dan Implementasi Model Pembelajaran *E-Learning* untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Agustinus Heri Nugroho*)

Abstract

Supported of network computer instrument motivates to develop services facilities for university students. Besides equipping the academic information system, university students' demand is be equipped good instrument learning. Several research mentioning in this decade more university student's demand to have more quality time to be discussed and exchanged ideas with another person and they are helped to understand of subject matter. Instruction with classroom method can't provide more times to fulfill university students' demands. One of alternative can be gave more times and opportunity to university students to be discussed, sharing and exchanged idea is or e-learning. E-learning is process learning with electronic media. Benefit e-learning as instrument instruction is instruction quality be increased, and can refer to aspects as follow: (1) increasing knowledge, (2) increasing skills, (3) changed of attitude, (4) behavior, (5) able to adaptation, (6) increasing integration, (7) increasing participation and (8) increasing culture interaction will be best.

Keyword: *e-learning, web, internet, instruction quality.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan cepat. Menurut catatan *www.internetworldstats.com/* saat ini ada satu milyar pengguna internet di dunia. Penetrasi internet di Asia adalah 10%, sedangkan di Amerika mencapai 67%. Indonesia menduduki urutan ke-13 pengguna internet dunia dengan jumlah pengguna internet tahun 2006 sebanyak 18 juta orang. Angka itu mencapai 10 kali lebih besar dibanding lima tahun lalu. Tidak berlebihan apabila ada yang mengatakan bahwa TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) membawa gelombang baru menuju perubahan besar dalam sejarah kebudayaan manusia sehingga perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi, yang tidak lagi terbatas pada informasi surat kabar, audio visual dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang salah satu diantaranya melalui jaringan internet. Salah satu bidang yang terkena dampak

*) ***Agustinus Heri Nugroho, S.Pd.*** *adalah staf pengajar Program Studi Pendidikan Akuntansi USD*

yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan, yang merupakan suatu proses komunikasi dan informasi dari pendidik sebagai sumber informasi pendidikan kepada peserta didik melalui media sebagai sarana penyajian ide, gagasan dan materi pendidikan (Oetomo dan Priyogutomo, 2004). Beberapa bagian unsur tersebut mendapatkan sentuhan media teknologi informasi, sehingga mencetuskan lahirnya ide tentang *e-learning* (Utomo, 2001). Sedangkan pada *blue print* TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Depdiknas, disebutkan ada tujuh fungsi TIK dalam pendidikan, yakni sebagai: sumber belajar, alat bantu belajar, fasilitas pembelajaran, standar kompetensi, sistem administrasi, pendukung keputusan, dan infrastruktur.

Skenario mengajar dan belajar perlu disiapkan secara matang dalam sebuah kurikulum pembelajaran yang memang dirancang berbasis internet. Mengimplementasikan pembelajaran berbasis internet bukan berarti sekedar meletakkan materi ajar pada *web*. Selain materi ajar, skenario pembelajaran perlu disiapkan dengan matang untuk mengundang keterlibatan peserta didik secara aktif dan konstruktif dalam proses belajar mereka.

Teknologi baru terutama dalam bidang ICT (*Information and Communication Technology*) memiliki peran yang semakin penting dalam pembelajaran. Banyak orang percaya bahwa multimedia akan dapat membawa kita kepada situasi belajar dimana *"learning with effort"* akan dapat digantikan dengan *"learning with fun"*. Apalagi dalam pembelajaran orang dewasa, *learning with effort* menjadi hal yang cukup menyulitkan untuk dilaksanakan karena berbagai faktor pembatas seperti usia, kemampuan daya tangkap, kemauan berusaha, dan lain-lain. Jadi proses pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif menjadi pilihan para fasilitator. Jika situasi belajar seperti ini tidak tercipta, paling tidak multimedia dapat membuat belajar lebih efektif. Pada saat ini kita semua memahami bahwa "proses belajar" dipandang sebagai proses yang aktif dan partisipatif, konstruktif, kumulatif, dan berorientasi pada tujuan pembelajaran, baik Kompetensi Dasar (KD) maupun indikator pencapaian pembelajaran.

Mengkombinasikan antara pertemuan secara tatap muka dengan pembelajaran elektronik dapat meningkatkan kontribusi dan interaktifitas antarpeserta didik. Melalui tatap muka peserta didik dapat mengenal sesama peserta didik dan guru/dosen pendampingnya. Keakraban ini sangat menunjang kerja kolaborasi mereka secara virtual. Persiapan matang sebelum mengimplementasikan sebuah pembelajaran berbasis multimedia memegang peran penting demi kelancaran proses pembelajaran. Segala persiapan seperti penjadwalan sampai dengan penentuan teknis komunikasi selama proses pembelajaran merupakan tahapan penting dalam melaksanakan pembelajaran berbasis *web*.

B. Kualitas Pembelajaran

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Menurut Etzioni (Riana, 2006), secara definitif efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Efektivitas ini sesunguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, akan tetapi juga dapat pula dilihat dari sisi persepsi atau sikap orangnya. Di samping itu, efektivitas juga dapat dilihat dari bagaimana tingkat kepuasan yang dicapai oleh orang sesuai dengan pendapat Robbins (Riyana, 2006).

Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai sasarannya atau suatu tingkatan terhadap mana tujuan-tujuan dicapai seperti yang dimaksud dalam Prokopenko (Riyana, 2006), atau tingkat pencapaian tujuan yang dikemukakan oleh Hoy dan Miskel (Riyana, 2006). Sementara itu, belajar dapat pula dikatakan sebagai komunikasi terencana yang menghasilkan perubahan atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam hubungannya dengan sasaran khusus yang berkaitan dengan pola berperilaku yang diperlukan individu untuk mewujudkan secara lengkap tugas atau pekerjaan tertentu (Bramley, dalam Riyana, 2006). Dengan demikian, yang dimaksud dengan efektivitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran seni. Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran.

Dengan pemahaman tersebut di atas, maka dapat dikemukakan cakupan aspek efektivitas belajar sebagai berikut: (1) peningkatan pengetahuan, (2) peningkatan ketrampilan, (3) perubahan sikap, (4) perilaku, (5) kemampuan adaptasi, (6) peningkatan integrasi, (7) peningkatan partisipasi, dan (8) peningkatan interaksi kultural. Keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa ditentukan oleh efektivitasnya dalam upaya pencapaian kompetensi belajar.

UNESCO (Riana, 2006) menetapkan 4 (empat) pilar pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan, yaitu: 1) Belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (*learning to know*). Merealisasikan *learning to know*, dosen seyogyanya berfungsi sebagai fasilitator. Di samping itu dosen dituntut untuk dapat berperan sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan mahasiswa dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu; 2) belajar untuk menguasai keterampilan (*learning to do*). *Learning to do* akan bisa berjalan jika sekolah memfasilitasi mahasiswa untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya, bakat, dan minatnya. Pendeteksian bakat dan minat mahasiswa dapat dilakukan melalui tes bakat dan minat (*aptitude*

test). Walaupun bakat dan minat anak banyak dipengaruhi unsur keturunan (*heredity*). Tumbuh berkembangnya bakat dan minat tergantung pada lingkungannya. Dewasa ini, keterampilan bisa digunakan menopang kehidupan seseorang bahkan keterampilan lebih dominan daripada penguasaan pengetahuan dalam mendukung keberhasilan kehidupan seseorang. Untuk itu pembinaan terhadap keterampilan mahasiswa perlu mendapat perhatian serius; 3) belajar untuk hidup bermasyarakat (*learning to live together*). Salah satu fungsi lembaga pendidikan adalah tempat bersosialisasi, tatanan kehidupan, artinya mempersiapkan mahasiswa untuk dapat hidup bermasyarakat. Situasi bermasyarakat hendaknya dikondisikan di lingkungan perkuliahan. Kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima, perlu ditumbuhkembangkan. Kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya proses "*learning to live together*"; (4) belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal (*learning to be*). Pengembangan diri secara maksimal (*learning to be*) erat hubungannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak serta kondisi lingkungannya. Bagi anak yang agresif, proses pengembangan diri akan berjalan bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Sebaliknya bagi anak yang pasif peran dosen sebagai pengarah sekaligus fasilitator sangat dibutuhkan untuk pengembangan diri mahasiswa secara maksimal. Kemampuan diri yang terbentuk di sekolah secara maksimal memungkinkan anak untuk mengembangkan diri pada tingkat yang lebih tinggi.

Keempat pilar akan berjalan dengan baik jika diwarnai dengan pengembangan keberagamaan. Pengintegrasian nilai-nilai agama ke dalam mata pelajaran yang diajarkan/dipelajari mahasiswa akan lebih efektif dalam pembentukan pribadi anak yang ber-Ketuhahan Yang Maha Esa daripada diajarkan secara monolitik yang penuh dengan konsep.

C. Peranan Media Ajar dalam Proses Pembelajaran

Strategi mengajar menurut Muhibbin Syah (2002) adalah sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Strategi mengajar ini mencakup beberapa tahapan, seperti: 1) strategi perumusan sasaran proses pembelajaran, yang berkaitan dengan strategi yang akan digunakan oleh pengajar dalam menentukan pola ajar untuk mencapai sasaran proses pembelajaran; 2) strategi perencanaan proses pembelajaran, berkaitan dengan langlah-langkah pelaksanaan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini termasuk perencanaan tentang media ajar yang akan digunakan; 3) strategi pelaksanaan proses balajar mengajar, berhubungan dengan pendekatan sistem pengajaran yang benar-benar sesuai dengan pokok bahasan materi ajar.

Dalam pelaksanaannya, teknik penggunaan dan pemanfaatan media turut memberikan andil yang besar

dalam menarik perhatian mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pada dasarnya media mempunyai dua fungsi utama, yaitu media sebagai alat bantu dan media sebagai sumber belajar bagi mahasiswa (Djamarah, 2002:137). Umar Hamalik (1986), Djamarah (2002) dan Sadiman, dkk (1986), mengelompokkan media ini berdasarkan jenisnya ke dalam beberapa jenis: 1) media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti *tape recorder*; 2) media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indra penglihatan dalam wujud visual; 3) media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, dan media ini dibagi ke dalam dua jenis (a) audiovisual diam, yang menampilkan suara dan visual diam, seperti film *sound slide*; (b) audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film, *video cassete* dan VCD.

Selain media-media tersebut di atas, kehadiran perangkat komputer merupakan suatu hal yang harus dikondisikan dan disosialisasikan untuk menjawab tantangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain sangat banyak pengguna jasa di bidang komputer yang mengharapkan dapat membantu mereka baik sebagai *tutor, tutee* maupun *tools* yang belum mampu dipenuhi oleh tenaga yang profesional di bidangnya yang dihasilkan melalui lembaga pendidikan yang ada. Hal ini juga dikeluhkan oleh para pengajar terhadap kemampuan untuk memahami, mengimplementasikan, serta mengaplikasikan pengajaran sejalan dengan tuntutan kurikulum karena keterbatasan informasi dan pelatihan yang mereka peroleh.

D. *E-Learning*

Jaya Kumar C. Koran (2002) mendefinisikan *e-learning* sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN, atau internet) untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Ada pula yang menafsirkan *e-learning* sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang dilakukan melalui media internet. Dong (Kamarga, 2002) mendefinisikan *e-learning* sebagai kegiatan belajar *asynchronous* melalui perangkat elektronik komputer yang memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Sementara, Soekartawi, Haryono dan Librero(2002) mendefinisikan *e-learning* sebagai berikut.

> *E-Learning is a generic term for all technologically supported learning using an array of teaching and learning tools as phone bridging, audio and videotapes, teleconferencing, satellite transmissions, and the more recognized web-based training or computer aided instruction also commonly referred to as online courses.*

Rosenberg (2001) menekankan bahwa *e-learning* merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang

dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini senada dengan Cambell (2002), Kamarga (2002) yang intinya menekankan penggunaan internet dalam pendidikan sebagai hakekat e-*learning*. Menurut Onno W. Purbo (2002) istilah "e" atau singkatan dari elektronik dalam *e-learning* digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pengajaran lewat teknologi elektronik internet.

Internet, intranet, satelit, tape audio/video, TV interaktif dan CD-ROM adalah sebagian dari media elektronik yang digunakan. Pengajaran boleh disampaikan secara *'synchronously'* (pada waktu yang sama) ataupun 'a*synchronously*' (pada waktu yang berbeda). Materi pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui media ini berisikan teks, grafik, animasi, simulasi, audio dan vide yang memberikan kemudahan untuk '*discussion group'* dengan bantuan profesional dalam bidangnya.

Perbedaan pembelajaran tradisional dengan *e-learning* yaitu: pada kelas 'tradisional', dosen/guru dianggap sebagai orang yang serba tahu dan ditugaskan untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Dalam pembelajaran '*e-learning'* fokus utamanya adalah mahasiswa/siswa. Mahasiswa mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung-jawab untuk pembelajarannya. Suasana pembelajaran '*e-learning'* akan 'memaksa' mahasiswa memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembelajarannya. Mahasiswa membuat perancangan dan mencari materi dengan usaha, dan inisiatif sendiri.

Khoe Yao Tung (2000) mengatakan bahwa internet akan menjadi suplemen dan komplemen dalam menjadikan wakil guru yang mewakili sumber belajar yang penting di dunia. Cisco (2001) menjelaskan filosofis *e-learning* sebagai berikut: 1) *e-learning* merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, pelatihan secara *on-line;* 2) *e-learning* menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional (model belajar konvensional, kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer) sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan globalisasi; 3) *e-learning* tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan *content* dan pengembangan teknologi pendidikan; 4) kapasitas mahasiswa amat bervariasi tergantung pada bentuk isi dan cara penyampaiannya. Semakin baik keselarasan antar konten dan alat penyampai dengan gaya belajar, maka akan lebih baik kapasitas siswa yang pada gilirannya akan memberi hasil yang lebih baik.

Onno W. Purbo (2002) mensyaratkan tiga hal yang wajib dipenuhi dalam merancang *e-learning*, yaitu: sederhana, personal dan cepat. Sistem yang sederhana akan memudahkan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi dan menu yang ada. Kemudahan pada panel yang disediakan akan mengurangi pengenalan sistem *e-learning* itu sendiri, sehingga waktu belajar peserta dapat diefisienkan.

Syarat personal *e-learning* adalah dapat berinteraksi dengan baik seperti layaknya seorang guru yang berkomunikasi dengan murid di depan kelas. Dengan pendekatan dan interaksi yang lebih personal, peserta didik diperhatikan kemajuannya, serta dibantu segala persoalan yang dihadapinya. Hal ini akan membuat peserta didik betah berlama-lama di depan layar komputernya. Layanan *e-learning* selanjutnya perlu ditunjang dengan kecepatan, respon yang cepat terhadap keluhan dan kebutuhan peserta didik lainnya. Dengan demikian perbaikan pembelajaran dapat dilakukan lebih cepat oleh pengajar atau pengelola.

E. Fungsi dan Manfaat *E-Learning*

1. Fungsi *E-Learning*

Menurut Siahaan (2002), ada 3 (tiga) fungsi pembelajaran elektronik pada pembelajaran di dalam kelas (*classroom instruction*), yaitu sebagai: 1) *suplemen*. Peserta didik mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban/keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan; 2) *komplemen (tambahan)*. Materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas (Lewis, 2002). Sebagai komplemen berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi *reinforcement* (pengayaan) atau *remedial* bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Materi pembelajaran elektronik dikatakan sebagai *enrichment*, apabila kepada peserta didik yang dapat dengan cepat menguasai/memahami materi pelajaran yang disampaikan guru secara tatap muka (*fast learners*) diberikan kesempatan untuk mengakses materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus dikembangkan untuk mereka. Tujuannya agar semakin memantapkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran yang disajikan guru di dalam kelas. Dikatakan sebagai program remedial, apabila kepada peserta didik yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang disajikan guru secara tatap muka di kelas *(slow learners*) diberikan kesempatan untuk memanfaatkan materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus dirancang untuk mereka. Tujuannya agar peserta didik lebih mudah memahami materi pelajaran yang disajikan guru di kelas; 3) *substitusi (pengganti)*. Beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran/perkuliahan kepada para mahasiswanya. Tujuannya agar para mahasiswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari mahasiswa. Ada 3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih peserta didik, yaitu: a) sepenuhnya secara tatap muka (konvensional); b)

sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet, atau bahkan; c) sepenuhnya melalui internet. Alternatif model pembelajaran mana pun yang akan dipilih mahasiswa tidak menjadi masalah dalam penilaian karena ketiga model penyajian materi perkuliahan mendapatkan pengakuan atau penilaian yang sama. Jika mahasiswa dapat menyelesaikan program perkuliahannya dan lulus melalui cara konvensional atau sepenuhnya melalui internet, atau melalui perpaduan kedua model ini, maka institusi penyelenggara pendidikan akan memberikan pengakuan yang sama. Fleksibilitas ini dinilai sangat membantu mahasiswa untuk mempercepat penyelesaian perkuliahannya.

2. Manfaat *E-Learning*

Menurut Bates (1995) dan Wulf (1996), manfaat pembelajaran elektronik (*e-Learning*), yaitu: 1) Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruktur (*enhance interactivity*). Apabila dirancang secara cermat, pembelajaran elektronik dapat meningkatkan kadar interaksi pembelajaran, baik antara peserta didik dengan guru/instruktur, antar sesama peserta didik, maupun antara peserta didik dengan bahan belajar (*enhance interactivity*). Berbeda halnya dengan pembelajaran yang bersifat konvensional. Tidak semua peserta didik dalam kegiatan pembelajaran konvensional mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan pendapatnya di dalam diskusi. Hal ini disebabkan karena pada pembelajaran yang bersifat konvensional, kesempatan yang ada atau yang disediakan dosen/guru/instruktur untuk berdiskusi atau bertanya jawab sangat terbatas; 2) Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja (*time and place flexibility*). Mengingat sumber belajar yang sudah dikemas secara elektronik dan tersedia untuk diakses oleh peserta didik melalui internet, maka peserta didik dapat melakukan interaksi dengan sumber belajar ini kapan saja dan dari mana saja (Dowling, 2002). Tugas-tugas pembelajaran dapat diserahkan kepada guru/dosen/instruktur begitu selesai dikerjakan. Tidak perlu menunggu pertemuan mahasiswa dengan dosen/instruktur; 3) menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas (*potential to reach a global audience*). Dengan fleksibilitas waktu dan tempat, maka jumlah peserta didik yang dapat dijangkau melalui kegiatan pembelajaran elektronik lebih banyak atau meluas. Dengan kata lain ruang dan tempat serta waktu tidak lagi menjadi hambatan. Siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, seseorang dapat belajar. Interaksi dengan sumber belajar dilakukan melalui internet. Kesempatan belajar benar-benar terbuka lebar bagi siapa saja yang membutuhkan; 3) mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran (*easy updating of content as well as archivable capabilities*). Fasilitas yang tersedia dalam teknologi internet dan berbagai perangkat lunak *(software*) yang terus berkembang turut membantu mempermudah pengembangan bahan belajar

elektronik. Demikian juga dengan penyempurnaan atau pemutakhiran bahan belajar sesuai dengan tuntutan perkembangan materi keilmuannya dapat dilakukan secara periodik dan mudah. Di samping itu, penyempurnaan metode penyajian materi pembelajaran dapat pula dilakukan, baik yang didasarkan atas umpan balik dari peserta didik maupun atas hasil penilaian guru/dosen/instruktur selaku penanggung jawab atau pembina materi pembelajaran itu sendiri.

F. *E-Learning* sebagai Media Pembelajaran

E-learning disampaikan dengan menggunakan media elektronik yang terhubung dengan internet (*World Wide Web)* yang menghubungkan semua unit komputer di seluruh dunia yang terkoneksi dengan internet dan intranet (jaringan yang bisa menghubungkan semua unit komputer dalam sebuah perusahaan). Dengan cara ini, jumlah pembelajar yang bisa ikut berpartisipasi bisa jauh lebih besar dari pada cara belajar konvensional di ruang kelas (jumlah siswa tidak terbatas pada besarnya ruang kelas). Teknologi ini memungkinkan penyampaian pelajaran dengan kualitas yang relatif lebih standar dari pada pembelajaran di kelas yang tergantung pada "*mood*" dan kondisi fisik dari instruktur. Dalam *e-learning*, modul-modul yang sama (informasi, penampilan, dan kualitas pembelajaran) bisa diakses dalam bentuk yang sama oleh semua siswa yang mengaksesnya. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional di kelas, karena alasan kesehatan atau masalah pribadi, seorang instruktur ada kemungkinan memberikan pelajaran di beberapa kelas dengan kualitas yang berbeda.

E-learning dalam arti luas bisa mencakup pembelajaran yang dilakukan di media elektronik (internet) baik secara formal maupun informal. *E-learning* secara formal adalah pembelajaran dengan kurikulum, silabus, mata pelajaran dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati pihak-pihak terkait (pengelola *e-learning* dan pembelajar sendiri). Pembelajaran seperti ini membutuhkan tingkat interaksinya tinggi dan diterapkan oleh perusahaan pada karyawannya, atau pembelajaran jarak jauh yang dikelola oleh universitas, dan perusahaan-perusahaan (biasanya perusahan konsultan) yang memang bergerak di bidang penyediaan jasa *e-learning* untuk umum. *E-learning* bisa juga dilakukan secara informal dengan interaksi yang lebih sederhana, misalnya melalui sarana *mailing list*, *e-newsletter* atau *website* pribadi, organisasi dan perusahaan yang ingin mensosialisasikan jasa, program, pengetahuan atau keterampilan tertentu pada masyarakat luas (biasanya tanpa memungut biaya).

Beberapa manfaat lain yang bisa dinikmati dari proses pembelajaran dengan *e-learning*, diantaranya: 1) *fleksibilitas*. Jika pembelajaran konvensional di kelas mengharuskan siswa untuk hadir di kelas pada jam-jam tertentu (seringkali jam ini berbenturan dengan kegiatan rutin siswa), maka *e-learning* memberikan

fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Siswa tidak perlu mengadakan perjalanan menuju tempat pelajaran disampaikan oleh sebab bisa diakses dari mana saja yang memiliki akses ke internet. Bahkan, dengan berkembangnya *mobile technology* (dengan *palmtop*, bahkan telepon selular jenis tertentu), semakin mudah mengakses *e-learning*. Berbagai tempat juga sudah menyediakan sambungan internet gratis (di bandara internasional dan cafe-cafe tertentu); 2) *independent learning*. *E-learning* memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk memegang kendali atas kesuksesan belajar masing-masing, artinya pembelajar diberi kebebasan untuk menentukan kapan akan mulai, kapan akan menyelesaikan, dan bagian mana dalam satu modul yang ingin dipelajarinya terlebih dulu sesuai minatnya. Jika ia mengalami kesulitan untuk memahami suatu bagian, ia bisa mengulang-ulang lagi sampai ia merasa mampu memahami. Seandainya, setelah diulang masih ada hal yang belum ia pahami, pembelajar bisa menghubungi instruktur, nara sumber melalui *email* atau ikut dialog interaktif pada waktu-waktu tertentu. Jika ia tidak sempat mengikuti dialog interaktif, ia bisa membaca hasil diskusi di *message board* yang tersedia di LMS (di *Website* pengelola). Banyak orang yang merasa cara belajar independen seperti ini lebih efektif daripada cara belajar lainnya yang memaksakannya untuk belajar dengan urutan yang telah ditetapkan; 3) *biaya*. Banyak biaya yang bisa dihemat dari cara pembelajaran dengan *e-learning*. Biaya di sini tidak hanya dari segi finansial tetapi juga dari segi non-finansial. Secara finansial, biaya yang bisa dihemat, antara lain biaya transportasi ke tempat belajar dan akomodasi selama belajar (terutama jika tempat belajar berada di kota lain dan negara lain), biaya administrasi pengelolaan (misalnya: biaya gaji dan tunjangan selama pelatihan, biaya instruktur dan tenaga administrasi pengelola pelatihan, makanan selama pelatihan), penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar (misalnya: penyewaan ataupun penyediaan kelas, kursi, papan tulis, LCD *player*, OHP).

Pada dasarnya cara penyampaian atau cara pemberian (*delivery system*) dalam *e-learning* dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi atau interaksi antara dosen dan mahasiswa memang sebaiknya melalui sistem dua arah. Dalam *e-learning*, sistem dua arah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 1) dilaksanakan melalui cara langsung artinya pada saat instruktur memberikan materi kuliah, peserta didik dapat langsung mendengarkan-nya; 2) dilaksanakan melalui cara tidak langsung misalnya pesan dari instruktur direkam dahulu sebelum digunakan.

Beberapa karakteristik *e-learning* yang dapat dijadikan media pembelajaran di perguruan tinggi dan di sekolah antara lain: 1) memanfaatkan jasa teknologi elektronik, dosen dan mahasiswa atau guru dengan siswa, siswa dengan sesama siswa atau

dosen/guru dengan sesama dosen/ guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang bersifat protokoler; 2) memanfaatkan keunggulan komputer (*digital media dan computer networks*); 3) menggunakan bahan ajar bersifat mandiri (*self learning materials*) disimpan dikomputer sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan dimana saja bila yang bersangkutan memerlukan; 4) memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer.

Pemanfaatan *e-learning* tidak terlepas dari jasa internet. Teknik pembelajaran yang tersedia di internet begitu lengkap dan hal ini akan mempengaruhi tugas dosen dalam proses pembelajaran. Dahulu, proses belajar mengajar dominasi oleh peran pendidik, karena itu disebut *the era of teacher*. Kini, proses pembelajaran banyak didominsi oleh peran pendidik dan buku (*the era of teacher and book*) dan pada masa mendatang prose pembelajaran akan didominasi oleh peran pendidik, buku dan teknologi *(the era of teacher, book and technology*).

Dalam era global seperti sekarang ini, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus berhubungan dengan teknologi khususnya teknologi informasi. Hal ini disebabkan karena teknologi tersebut telah mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya sebaiknya kita tidak 'gagap' teknologi. Banyak hasil penelitian menunjukan bahwa siapa yang terlambat menguasai informasi, maka terlambat pulalah memperoleh kesempatan untuk maju.

Pengembangan *e-learning* tidak semata-mata hanya menyajikan materi pelajaran secara *online* saja, namun harus komunikatif dan menarik. Materi pembelajaran didesain seolah peserta didik belajar dihadapan pengajar memalui layar komputer yang dihubungkan melalui jaringan internet.

Untuk dapat menghasilkan *e-learning* yang menarik dan diminati dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, ada tiga syarat hal yang wajib dipenuhi dalam merancang *e-learning*, yaitu: 1) *sederhana*. Sistem yang sederhana akan memudahkan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi dan menu yang ada, dengan kemudahan pada panel yang disediakan, waktu belajar peserta akan lebih efisien; 2) *personal*. Pengajar/dosen dapat berinteraksi dengan baik dengan mahasiswanya, seperti layaknya berkomunikasi di depan kelas. Dengan pendekatan dan interaksi yang lebih personal, peserta didik diperhatikan kemajuanya, serta dibantu segala persoalan yang dihadapi; 3) *cepat*. Layanan yang ditunjang dengan kecepatan, respon yang cepat terhadap keluhan dan kebutuhan peserta didik, sehingga perbaikan pembelajaran dapat dilakukan secepat mungkin oleh pengajar atau pengelola.

Secara ringkas *e-learning* perlu diciptakan seolah-olah peserta didik belajar secara konvensional, hanya saja dipindahkan ke dalam sistem digital melalui internet. Karena itu *e-learning*

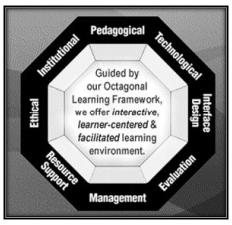
perlu mengadaptasi unsur-unsur yang biasa dilakukan dalam sistem pembelajaran konvensional. Misalnya dimulai dari perumusan tujuan operasional dan dapat diukur, ada apersepsi atau *pre test*, membangkitkan motivasi, menggunakan bahasa yang komunikatif, uraian materi yang jelas, contoh-contoh konkrit, *problem solving*, tanya jawab, diskusi, *post test*, sampai penugasan dan kegiatan tindak lanjutnya. Oleh karena itu merancang *e-learning* perlu melibatkan pihak terkait, antara lain: pengajar, ahli materi, ahli komunikasi, programmer, seniman dan lain-lain.

G. *E-Learning* sebagai Model Pembelajaran

Long (2004) mengungkapkan bahwa dengan perkembangan teknologi digital, internet dan multimedia yang sangat cepat, *web* telah menjadi satu kekuatan global, interaktif, dinamis, serta menjadi media belajar dan pengajaran. Internet menyediakan suatu peluang untuk mengembangkan *learning-on-demand* dan *learner-centered instruction and training*. Berbagai istilah diberikan untuk aktifitas *online learning* ini muncul seperti: *Web-Based Learning* (WBL), *Web-Based Instruction* (WBI), *Webbased Training*, *Internet-Based Training* (IBT) dan banyak istilah lainnya.*E-learning* digunakan untuk merepresentasikan pengajaran yang bersifat terbuka (*open*), fleksibel, dan terdistribusi. Lebih jauh Khan (2005), mendefinisikan e-learning:

> *E-learning can be viewed as an innovative approach for delivering welldesign, learner-centered, interactive, and facilitated learning environment to anyone, anyplace, anytime by utilizing the attributes and resources of various digital technologies along with other form of learning materials suited for open, flexible and ditributed learning environtment.*

Pengembangan *e-learning* tersebut harus dikembangkan dalam berbagai aspek yang disebut dengan *e-learning framework* (Khan, 2005) yang mencakup semua aspek dalam pengajaran, seperti pedagogik, teknologi, perancangan antar muka, evaluasi, manajemen, sumber daya pendukung, etika dan institusional yang dapat digambarkan pada gambar 1.



Gambar 1:
E-Learning Framework
(Sumber: Khan, 2005)

On line learning menurut Shank dan Sitze (2004:2) adalah usaha pembelajaran yang melibatkan penggunaan teknologi jaringan (seperti internet atau jaringan bisnis) untuk proses penyampaian dan penyebaran informasi, pendukung dan penilaian formal dan informasi pengajaran.

Beberapa alasan utama untuk menggunakan *Online Learning*, menurut Shank dan Sitze (2004:2-3)

antara lain: 1) meningkatkan akses dan fleksibilitas (*improved access adn flexibility*); 2) cepat dalam penyebaran dan hemat (*faster delivery and cost savings*); 3) peningkatan pengawasan dan standardisasi (*improved control and standardization*); 4) memperbaiki komunikasi dan kerjasama (*enhanced communication adn collaboration*)

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pengembangan model *e-learning* perlu dipertimbangkan aspek *instructional technology*-nya dan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan peserta didik secara *virtual*. Pratt dan Pallof (2003) mengemukakan bahwa dalam model *virtual student* terdapat beberapa kebutuhan utama mereka dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan *e-learning*, antara lain: 1). fokus pada peserta didik (*focus on learner*); 2) pelatihan dan dukungan teknis (*training and technical support*); 3) layanan siswa terpadu (*integrated student services*); 4) pembiayaan dan aturan (*fees and policy development*)

H. Keunggulan dan Kekurangan *E-Learning*

Manfaat penggunaan internet, khususnya dalam pendidikan terbuka dan jarak jauh (Elangoan, 1999; Soekartawi, 2002; Mulvihil, 1997; Utarini, 1997), antara lain: 1) tersedianya fasilitas *e-moderating* di mana dosen dan mahasiswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara regular atau kapan saja, kegiatan berkomunikasi itu dilakukan dengan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat dan waktu; 2) dosen dan mahasiswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadual melalui internet, sehingga keduanya bisa saling menilai sampai berapa jauh bahan ajar dipelajari; 3) mahasiswa dapat belajar atau me-*review* bahan ajar (mata kuliah) setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer; 4) bila mahasiswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah; 5) baik doen maupun mahasiswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas; 6) berubahnya peran mahasiswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif; 7) relatif lebih efisien. Misalnya bagi mereka yang tinggal jauh dari perguruan tinggi atau sekolah konvensional.

Walaupun demikian pemanfaatan internet untuk pembelajaran atau *e-learning* juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Berbagai kritik (Bullen, 2001, Beam, 1997), antara lain: 1) kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya *values* dalam proses belajar dan mengajar; 2) kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis/komersial; 3) proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan; 4) berubahnya peran guru dari yang

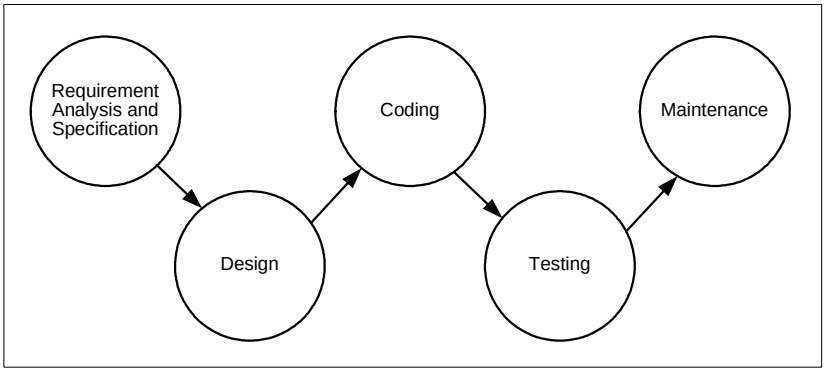
semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT; 5) siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal; 6) tidak semua tempat tersedia fasilitas internet; 7) kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki ketrampilan internet; 8) kurangnya penguasaan bahasa komputer.

I. Strategi Pengembangan *E-Learning*

Strategi pengembangan *e-learning*, pada hakekatnya adalah sama dengan strategi pengembangan perangkat lunak. Hal ini karena *e-learning* adalah juga merupakan suatu perangkat lunak. Dalam ilmu rekayasa perangkat lunak (*software engineering*), ada beberapa tahapan yang harus kita lalui pada saat mengembangkan sebuah perangkat lunak seperti pada bagan di bawah ini.

Masalah analisa kebutuhan pada makalah ini ditonjolkan karena ini hal terpenting yang sering dilupakan oleh pengembang aplikasi *e-learning*. Pengembang terobsesi untuk membuat aplikasi *e-learning* terlengkap dan terbaik, padahal itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dari pengguna. Saat ini sebenarnya industri *e-learning* sedang mengalami krisis, yang berakibat ke kegagalan *e-learning*. Dari sebuah studi tahun 2000 yang dilakukan oleh *Forrester Group* kepada 40 perusahaan besar menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja (lebih dari 68%) menolak untuk mengikuti pelatihan/kursus yang menggunakan konsep *e-learning*. Ketika *e-learning* itu diwajibkan kepada mereka 30% menolak untuk mengikuti (Dublin, 2003). Sedangkan studi lain mengindikasikan bahwa dari orang-orang yang mendaftar untuk mengikuti *e-learning*, 50-80% tidak pernah menyelesaikannya sampai akhir (Delio, 2000).

Dari berbagai literatur yang ada, kegagalan *e-learning* sebagian besar diakibatkan oleh kegagalan dalam analisa kebutuhan yang mengandung



Gambar 2: Tahapan Rekayasa Perangkat Lunak
(Sumber: Romi, 2003-2005)



Gambar 3:
Moodle - Learning Management System (LMS) Berbasis Opensource
Sumber: http://moodle.org



Gambar 4:
A Tutor: Learning Content Management System (LCMS) Berbasis Opensource.
Sumber: http://atutor.ca

pengertian bahwa pengembang tidak berhasil meng-*capture* apa sebenarnya kebutuhan dari pengguna (*user needs*). Hasil dari proses analisa kebutuhan (*requirements analysis*) pengguna diterjemahkan sebagai fitur-fitur yang sebaiknya masuk dalam sistem *e-learning* yang kita kembangkan.

Sebagai pedoman fitur-fitur yang biasanya disediakan dalam sistem *e-learning* adalah seperti di bawah. Contoh di bawah belum tentu meliputi seluruh kebutuhan pengguna. Demikian juga belum tentu sebuah sistem *e-learning* harus memasukkan semua fitur-fitur di bawah.

Mengembangkan sistem berdasarkan kepada kebutuhan pengguna yang sebenarnya (*user needs*) yaitu: 1) informasi tentang unit-unit terkait dalam proses pembelajaran, antara lain: tujuan dan sasaran, silabus, metode pengajaran, jadwal kuliah, tugas, jadwal Ujian, daftar referensi atau bahan bacaan, profil dan kontak pengajar; 2) kemudahan akses ke sumber referensi, antara lain: diktat dan catatan kuliah, bahan presentasi, contoh ujian yang lalu, FAQ (*Frequently Asked Questions*), sumber-sumber referensi untuk pengerjaan tugas, situs-situs bermanfaaat, artikel-artikel dalam jurnal *online; 3) komunikasi dalam kelas, yaitu: f*orum diskusi online, m*ailing list* diskusi, papan pengumuman yang menyediakan informasi (perubahan jadwal kuliah, informasi tugas dan *deadline*-nya); 4) sarana untuk melakukan kerja kelompok, yaitu: *s*arana untuk *sharing file* dan direktori dalam kelompok, sarana diskusi untuk mengerjakan tugas daam kelompok, sistem ujian online dan pengumpulan *feedback*

J. Aplikasi *E-Learning* dan Penerapannya

Beberapa contoh aplikasi *e-learning* yang ada termasuk penerapan dalam berbagai bidang dapat dipelajari dari *sceenshoot* gambar 3 dan gambar 4.

K. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan tulisan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Model pembelajaran dengan kelas virtual (*e-learning*) memberikan sebuah terobosan baru di bidang pengajaran dan pembelajaran, karena mampu meminimalkan perbedaan cara mengajar dan materi, sehingga memberikan standar kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih konsisten pada aspek-aspeknya sebagai berikut: peningkatan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, perubah-an sikap, perilaku, kemampuan adaptasi, peningkatan integrasi, pening-katan partisipasi, dan peningkat-an interaksi kultural.

Sistem pembelajaran *e-learning* adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan jaman dengan dukungan teknologi informasi dimana semua menuju ke era digital, baik mekanisme maupun konten.

Perkuliahan/proses pembelajaran dengan metode *e-learning* yang bersifat *online* dengan didukung perangkat lunak yang dapat mengatur pertemuan *online* maka proses pembelajaran dapat dilakukan secara bersamaan atau *real time* tanpa kendala jarak dan waktu.

Pengembangan model pembelajaran elektronik (*e-learning*) guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran maka diperlukan keterlibatan/sinergi dari berbagai pihak yaitu pengajar, pakar pendidikan/ahli materi, pakar teknologi informasi/ahli media, programmer dan seniman sehingga tercipta perpaduan dan penciptaan inovasi pembelajaran yang lebih simpel dan fleksibel.

2. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yang tentunya didasarkan pada tulisan di atas adalah sebagai berikut.

Penerapan *e-learning* pada proses pembelajaran dapat menghemat biaya pengajaran dan pelatihan, akan tetapi memerlukan investasi yang sangat besar pada permulaanya, sehingga jika tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan kerugian yang besar.

Pemanfaatan *e-learning* membutuhkan budaya belajar mandiri dan kebiasaan untuk belajar. Kurang-nya interaksi antar dosen dengan mahasiswa atau bahkan antar mahasiwa itu sendiri bisa memperlambat terbentuknya budaya atau *values* dalam proses belajar dan mengajar.

Sarana *e-learning* ini sangat positif sekali untuk dikembangkan dengan layanan yang lain seperti media komunikasi dalam format *video* atau *voice*.

Daftar Pustaka

Anwar, Oos M., (2000). "Internet: Peluang dan Tantangan Pendidikan Nasional", *Jurnal Teknodik Depdiknas*, Jakarta

Baisoetii. (1998). *Komputer dan*

Pendidikan. Yogyakarta

Bloom, S. Benyamin (1956). *Taxonomy of Educational Objective The Classification of Educational Goal*.

Daniel, Jos, (1986). *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta.

Depdiknas, (2004). *Blue Print ICT untuk Pendidikan*, Jakarta

Djamarah, Syaiful B dan Zain, Aswan. (2002). *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta.

Green, L (1996). *Creatives Slide/Tape Programs*. Colorado: Libraries Unlimited, Inc. Littleton.

Hackbarth S. (1996). *The Educational Technology Handbook*. New Jersey: Educational Technology Publication, Englewood Cliffs.

Hamalik, Oemar (1986). *Media Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alumni

Hannafin, M. J., Peck, L. L. (1998). *The Design Development and Education of Instructional Software*. New York: Mc. Millan Publ., Co.

Hasbullah, (2006). "Implementasi E-Learning dalam Pengembangan Pembelajaran di Perguruan Tinggi (Proceeding)", SNPTE 2006, UNY, Yogyakarta.

Hasbullah, (2007). "Perancangan dan Implementasi Model Pembelajaran E-Learning untuk Meningkatakan Kualitas Pembelajaran di JPTE, FPTK, Universitas Pendidikan Indonesia", Bandung didownload dari *www.google.com* tanggal 24 September 2008 jam 10.03 WIB.

Heinich, R., et. al. (1996). *Instructional Media and Technologies for Learning*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Horton, William. (2000). *Designing Web Based Training*, John Wiley & Son Inc. USA.

Joyce.Weil M & Showers. B (1992). *Models of Teaching*. Massachussetts Allyn and Bacon.

Kamarga, Hanny. (2002). *Belajar Sejarah melalui e-learning; Alternatif Mengakses Sumber Informasi Kesejarahan*, Jakarta: Inti Media.

Khan, B.H. (1997). *Web-Based Instruction. Educational Technology Publications*, New Jersey: Englewood Cliffs.

Khan, Badrul, (2005). *Managing E-Learning Strategies: Design, delivery, implementationand evaluation*. Washington : Information Science Publishing.

Koran, Jaya Kumar C. (2002). "Aplikasi E-Learning dalam Pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Malaysia". (8 November 2002).

Long, Huey B. (2004). *E-Learning: An Introduction dalam Getting The Most from Online Learning*, Editor by Piskurich, George. M. San Francisco, USA: Pfeiffer, John Wiley & Son, Inc.

Mayer, R. E. (2001). *Multimedia Learning*. USA: Cambride University

Press.

Mayer, RE & Moreno R, (2004). *Animation As An Aid To Multimedia Learning*. Educational Psychology Review

McManus, T. (1995). *Special Considerations For Designing Internet Based Education*. Technology and Teacher Education Annual,

Pramono, H. (2004). "Bilamanakah Multimedia Menunjang Kualitas Pembelajaran?" *Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran*, Jakarta.

Pratt, Keith and Pallof, Rena M. (2003). *The Virtual Student: A Profile and Guide to Working with Online Learners*, San Francisco, USA: Jossey-Bass an Imprint of Wiley.

Riana, Cepi, (2006). "Hakikat Kualitas Pembelajaran", didownload dari *http://cepiriyana.blogspot.com/2006/06/hakikat-kualitas-pembelajaran.html*. tanggal 29 September 2008 jam 16.05 WIB

Wahono, Romi Satria, (2003). "Strategi Baru Pengelolaan Situs E-Learning Gratis", *http://www.ilmukomputer.com*.

Wahono, Romi Satria, (2005). "Pengantar E-Learning dan Pengembangannya, didownload dari http://*www.ilmukomputer.com* tanggal 19 Maret 2008 jam 15.46 WIB.

Ryann, Ellis., (2004). "Learning Circuit, E-Learning Trends 2004", *http:/www.learningcircuits.org/2004/nov2004/LC_Trends_2004.htm*

Shanks, Patty and Amy Sitze. (2004). *Making Sense of Online Learning, A Guide for Beginners and the Truly Skeptical*. San Francisco, USA: Pfeiffer, John Wiley & Son, Inc.

Soekartawi, (2003). "Prinsip Dasar E-Learning: Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia", *Jurnal Teknodik*, Edisi No.12/VII/Oktober/2003.

Soekarwati, (2000). "Prospek Pembelajaran Melalui Internet", *Makalah Seminar Teknologi Kependidikan*, UT Pustekkom dan IPTPI, Jakarta.

Syah, Muhibbin. (2002). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Rosda karya

Tafiardi, (2005). "Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui E-Learning", *Jurnal Pendidikan Penabur,* Juli 2005, Jakarta.

Utomo, Junaidi. (2001). "Dampak Internet Terhadap Pendidikan: Transformasi atau Evolusi", *Seminar Nasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Waller, Vaughan and Wilson, (2001). "A Definition for E-Learning, in Newsletter of Open and Distance Learning Quality Control". *http://www.odlqc.org.uk/odlqc/n19-e.html*.

Performance Audit :
Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Pada Publik

Rita Eny Purwanti[*)]

Abstract

The financial statements of public sector is important. Its could help the government for their accountability how to manage the resources. The government should do the best performance to achieve the objectives. The financial statement should be audited by the independent auditor. The audit for public sectors are examinations of the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources, including the evaluation of service quality and the measurement of performance (value for money audit). Performance audit has be the important factors for measuring of effectiveness in the organization of public sector.

Key word : *performance audit, value for money audit*

A. Pendahuluan

Pada akhir tahun 1960, auditor di negara bagian Washington melakukan *performance audit* terhadap perjalanan ke Puerto Rico yang dilakukan oleh beberapa anggota legislatif. Merasa dipermalukan oleh hasil audit tersebut, *the Washington State Legislature* pada tahun 1969 meminta *the state auditor* untuk melakukan *performance audits of state government*. Itulah sekilas tentang sejarah *perfomance audit* di Amerika Serikat. Sejalan dengan berkembangnya sektor publik akhir-akhir ini, beberapa penelitian atau artikel mengupas tentang *performance audit*.

Pertanggungjawaban sektor publik menggambarkan hubungan antara pemerintah dan lembaga legislatif. Kedua lembaga pada dasarnya bersifat independen. Pemerintah menggunakan sumber-sumber yang ada dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai konsekuensinya, pemerintah menyampaikan laporan keuangan untuk meminimalkan risiko hubungan kedua lembaga, laporan keuangan tersebut perlu dimintakan pendapat pada auditor independen terkait dengan kebutuhan pihak ketiga. Hal demikian disebabkan adanya permasalahan antara lain; *moral hazard-conflict of interest; remoteness - k*egiatan secara phisik tanpa pengawasan; *complexity* - kemungkinan legislatif secara teknis tidak memahami proyek yang dikerjakan pemerintah; dan *consequence of error*-kesalahan pemerintah

[*)] ***Rita Eny Purwanti, S.Pd., M.Si.*** *adalah staf pengajar Program Studi Pendidikan Akuntansi USD*

dapat menyebabkan biaya yang tinggi, karena proyek yang dikerjakan pemerintah berdampak pada masyarakat.

Laporan keuangan sektor publik sangat penting, selain dapat membantu pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya, juga memungkinkan legislatif melakukan pengecekan apakah sumber-sumber tersebut telah memberikan *value* atau belum, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi akuntabilitas pemerintah kepada publik. Sebagai pihak yang diberi tanggung jawab, pemerintah berusaha untuk memberikan hasil terbaik. Pemerintah diharapkan berorientasi kepada hasil dan mendorong mereka untuk dapat mencapai tujuan.

Laporan keuangan yang digunakan untuk menjamin akuntabilitas kepada publik, seharusnya dinilai oleh pihak lain yang independen. Legislatif mempercayakan hal tersebut kepada auditor. Auditor selanjutnya diharapkan memberikan penilaian secara obyektif. *The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy* (CIPFA), sebuah organisasi akuntan profesional sektor publik di UK, antara lain menyebutkan bahwa audit pada sektor publik juga termasuk *examinations of the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources, including the evaluation of service quality and the measurement of performance (value for money audit)*.

Performance audit mempunyai peran penting dalam mengukur efektivitas organisasi sektor publik terhadap pencapaian tujuan dan penggunaan sumber-sumber secara efisien. Makalah ini akan membahas tentang *performance audit* dan perannya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada publik.

B. *Performance Audit*

Performance audit atau *Value for Money (VfM) audit*, menurut Power (1997) adalah *to evaluate performance according to three sorts of criteria*. Dia menyebut sebagai *'The Three E's'*, yaitu *economy - the acquisition of resources on the best possible terms; efficiency - the use of resources to achieve a given level of output*; dan *effectiveness - the match between intentions and outcomes*.

The South African Institute of Chartered Accountants (SAICA), sebuah organisasi akuntan di Afrika Selatan mendefinisikan *performance audit "an independent auditing process aimed at evaluating the measures instituted by management, or the lack of these measures; ensuring that resources have been acquired economically and are utilized efficiently and effectively; and reporting on the acquisition and use of resources to management or the relevant authority"*.

Performance audit penting dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah akan tanggung jawabnya atas penggunaan sumber kepada publik. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *performance audit* adalah audit yang dilakukan untuk mengevaluasi penca-

paian tujuan secara ekonomi, efisien dan efektif. Kinerja suatu entitas dinilai baik, jika entitas tersebut mampu melaksanakan tanggung jawabnya dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Secara teknis, kinerja akan baik jika entitas mampu menyediakan produk atau jasa pada tingkat ekonomi, efisien dan efektif. Konsep ekonomi, efisien dan efektif saling berhubungan dan tidak dapat diartikan secara terpisah (Mardiasmo, 2005). Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam *performance audit*, yaitu *audit as a process of social influence; audit as a process of knowledge creation and utilization, and audit as process that is influenced by external contingencies*.

Morin mengatakan bahwa kadang-kadang dalam melaksanakan *performance audit*, auditor dihadapkan pada misi yang saling kontradiksi: *blaming versus advising; controllers versus catalysts for change and improvement* (Morin, 2003). Berbeda dengan *financial statement audit*, pada *performance audit*, auditor menekankan opini tentang pelaksanaan suatu program atau entitas dalam mencapai tujuannya telah ekonomi, efisien dan efektif. *Performance audit* tidak berakhir begitu saja, auditor seharusnya memberikan rekomendasi perbaikan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas agen. Auditor harus mengungkapkan kegagalan atau hilangnya sumber-sumber akibat ketidakekonomisan yang dilakukan agen. Auditor memberikan rekomendasi langkah strategis agar tindakan pemerintah lebih efisien dan efektif, oleh karena itu auditor harus memiliki wawasan yang luas.

Pencapaian tujuan secara ekonomi, efisien dan efektif atas penggunaan sumber tergantung *existence of good management controls*. Pencapaian *optimum VfM* merupakan tanggung jawab manajemen. Secara umum, *management controls* dengan kebijakan dan prosedur melalui *planning, organizing, directing* dan *controlling* atas kegiatan tertentu harus konsisten dengan peraturan agar penggunaan sumber tidak boros atau hilang melalui *measuring*, *monitoring* dan *reporting* untuk menjamin tercapainya tujuan. Peran auditor adalah menyediakan *independent verified information* bahwa manajemen telah melaksanakan kegiatannya secara wajar dengan penggunaan sumber secara efisien dan efektif.

Lingkup *performance audit* sektor publik mencakup tanggung jawab manajemen dalam mengukur :

1. perolehan sumber-sumber dengan *the right quality, in the right quantity, at the right time and place, and at the lowest possible cost*;
2. optimalisasi pencapaian antara *output of goods, services, or other results* dengan input yang digunakan; dan
3. pencapaian *policy objectives, operational goals, and other intended effects*.

C. Tujuan *Performance Audit*

Tujuan utama *performance audit* adalah menyediakan informasi kepada

pihak ketiga berupa *independent information, assurance and opinion about economy, efficiency and effectiveness (in effect, value for money)* tentang *revenue, expenditure and the management of resources. Independent performance reviews* harus dapat mengidentifikasi penggunaan sumber dalam mencapai tujuan organisasi secara ekonomi, efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan *public accountability*.

Tujuan kedua *performance audit* adalah mengidentifikasi *improving value for money* dan membantu manajemen untuk *improving systems and controls*. Pendekatan yang diadopsi dalam *performance audit* meliputi *examination and evaluation* untuk *securing good value for money* terhadap dana publik yang digunakan untuk membiayai suatu program. *Performance audit* juga bermanfaat untuk memberikan informasi kepada publik atas *serious waste, extravagance or other examples of poor performance*.

Performance audit dapat juga membantu pemerintah dalam memberikan kontribusi atau memberikan dampak; *increasing income; reducing costs or expenditure, resulting in financial savings; improving efficiency; strengthening or enhancing management and administrative or organizational processes; improving the quality of services provided; achieving the body's aims and objectives more cost-effectively; developing policy; creating awareness of the need for good accountability and transparency in the use of resources*.

D. Jenis *Performance Audit*

Ruang lingkup *performance audit* adalah semua aktivitas pemerintah, termasuk proyek, kegiatan atau program. *Performance audit* dapat diaplikasikan atas dasar *input-based* (menekankan *cost of resources* yang digunakan dikaitkan dengan *output*) atau *system-based* (menekankan *staffing, organisational structure or procedures* dalam entitas); atau *output-based* (menekankan *effectiveness*). Namun secara garis besar ada empat kategori *performance audit* yaitu :

1. *Selective examinations*; meliputi audit karena adanya *serious waste and extravagance, improper expenditure, inefficiency, ineffectiveness or weaknesses in control or non-compliance with laws and regulations* yang menyebabkan *deficiencies or weaknesses* dan auditor memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
2. *Major broad-based examinations*, meliputi audit yang dilakukan kepada entitas *as a whole or important activities, projects or programs*. Audit ini dilakukan untuk memberikan laporan yang berimbang.
3. *Major reviews of standard managerial operations*, meliputi *reviews common procedures, systems or established good practice*.
4. *Smaller-scale examinations*, biasanya jenis audit ini digunakan untuk *improvements in VfM, strengthening systems and encouraging cost-consciousness*.

E. Cakupan *Performance Audit*

1. *Examining the Economy of Inputs*

Input meliputi sumber keuangan dan phisik (staf, gedung dan peralatan) yang digunakan dalam program. Kinerja yang dihasilkan diharapkan sesuai dengan input yang digunakan disebut *economy*. *Input economy* menjelaskan harapan pemerintah untuk meminimalkan penggunaan sumber-sumber tersebut. Metode yang digunakan untuk mengukur input, antara lain dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh input tersebut atau dapat menggunakan biaya historis. *Audit of input economy* memfokuskan penggunaan sumber keuangan dan sumber phisik. *Auditing economy* dalam penggunaan sumber keuangan memerlukan penentuan pengeluaran khususnya *non monetary resources*, seperti staf atau peralatan relatif dapat diminimalkan untuk mencapai kualitas hasil yang diharapkan. Dana hibah yang digunakan untuk membiayai suatu program atau biaya *overhead* harus dievaluasi dengan membandingkan biaya untuk program yang sejenis. *Examining economy* atas penggunaan sumber phisik, misalnya dengan menetapkan ukuran yang dibandingkan dengan *benchmarks*, demikian juga untuk biaya peralatannya.

2. *Examining the Efficiency of Processes*

Proses meliputi sistem, langkah dan keputusan manajemen termasuk penyediaan jasa oleh pemerintah. Proses tidak hanya kegiatan yang terkait langsung dengan penyediaan jasa tersebut, namun termasuk juga *planning, organizing, monitoring* dan *decision making*. Secara teknis, ukuran efisiensi suatu proses adalah *the relation between outputs and inputs*. *Outputs* adalah jasa atau produk yang dihasilkan oleh pemerintah, sedangkan *inputs* adalah sumber yang digunakan. *Inputs* diukur atas dasar unit, misalnya *person days, person hours, staff time, or full-time staff equivalents*. Hubungan antara *outputs* and *inputs* diukur dengan dua rasio efisiensi, yaitu *unit cost* dan *productivity*. *Unit costs* merupakan sejumlah *inputs* yang digunakan untuk menghasilkan *outputs*, misalnya berapa biaya per pasien?; apakah biaya klinik pemerintah per pasien di bawah klaim asuransi kesehatan? Sedangkan *utilization ratios* merupakan ukuran seperti *rates of equipment use*, *percentage of hospital beds occupied*, dan *recreation center occupancy*.

3. *Evaluating the Effectiveness of Outputs*

Outputs merupakan *units of service actually provided*, seperti *the number of construction permits issued; the number of students completing a training class*. Efektivitas output menggambarkan *quality of the services or products*. Program pemerintah seharusnya menggunakan *inputs* secara ekonomi dan dengan proses yang efisien. Publik, pembayar pajak, dan parlemen mengharapkan pemerintah

dapat menghasilkan *outputs* yang efektif. Harapan tersebut ditetapkan dalam berbagai bentuk, meliputi *output quantity or quality* dan *timeliness*.

Dalam *auditing*, *output quantity performance*, pertanyaan kuncinya adalah apakah sejumlah unit yang dihasilkan telah sesuai yang diharapkan atau yang diinginkan. Salah satu metode untuk menentukan *adequacy of a program's output quantity* adalah menguji *backlogs* atau *work in process*. Metode lainnya dalam mengukur *outputs* adalah dengan *ratio of demand*. *Output quality* tercapai jika tidak ada kelemahan unit yang dihasilkan atau jasa tersebut layak. Kualitas merupakan atribut *outputs* itu sendiri atau menyangkut bagaimana penyampaian *outputs* kepada pihak yang menjadi sasaran. Kualitas tersebut dapat diaudit terkait dengan; *accuracy*, *reliability, durability, serviceability* dan *appearance*. Auditor dapat juga melakukan pengukuran *cost of quality*, yaitu dengan menguji biaya yang digunakan untuk melakukan koreksi karena kesalahan, *controlling quality* atau pemborosan. *Output timeliness* mencakup *speed of work completion and delivery*. Auditor dapat melakukan pengukuran *output timeliness* dengan *cost of delays* atau *cost of customer wait times*.

4. *Evaluating Outcome Effectiveness*

Outcomes adalah hasil yang dicapai atas suatu program. Namun dari sisi aspek pengukuran, mengukur *outcomes* merupakan hal yang sulit, baik dari pemerintah maupun auditor. *Output* adalah produk atau jasa yang diciptakan oleh suatu program, sedangkan *outcome* menggambarkan perubahan suatu daerah atau tindakan akibat suatu program. Efektivitas *outcome* mengukur *quality of outcomes* dan hasil karena suatu program. Karakteristik yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas *outcome* adalah hasil dari suatu program atau suatu tingkat di mana misi suatu program tercapai, misalnya dalam bidang pendidikan, dengan adanya pelajaran tambahan akan menaikkan tingkat kelulusan.

Performance audit dapat juga menguji *cost-benefit* atau *cost-outcome,* misalnya total biaya yang diperlukan untuk pelatihan untuk karyawan, manfaat dari program pensiun. Ukuran efektivitas *outcome* dapat juga dilihat dari aspek keuangan, dengan mengukur *profit*, *cost recovery* dan *return on investment*. Kepuasan pelanggan juga merupakan metode lain dalam mengukur efektivitas *outcome*. Dalam perusahaan jasa, seperti pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, ukuran yang digunakan misalnya *percentage of services mobilized within a target response time*.

5. *Conducting of Performance Audit*

Langkah *performance auditing* sama dengan konsep manajemen kinerja manajemen yang digunakan oleh manajer program, yaitu dengan prinsip *plan, monitor, and evaluate how public resources are used to achieve*

public policy ends. Konsep *inputs, processes, outputs, outcomes, and impact* merupakan *interface* dengan tujuan *economy, efficiency, and effectiveness*. *Performance auditing* mengevaluasi kinerja manajemen publik. Bahasa kuncinya adalah *audit finding* dan *component elements*.

Komponen *performance audit* adalah *audit finding*. Struktur *audit finding* ditentukan oleh *audit objective (the key query that needs answering.) Audit finding* adalah elemen yang standar, terdiri dari :

1. *Criteria* menggambarkan kondisi yang seharusnya, meliputi *expectations, standards, rules, policies, benchmarks, program goals, or average performance in similar programs*. *Criteria* dapat ditetapkan dengan *benchmarking* program sejenis, *customer expectations or demands*, identifikasi *internal targets, industry or sector standards*, membandingkan dengan *trend* sebelumnya, identifikasi optimal *trend* atau rata-rata *trend* yang optimal.
2. *Conditions* adalah realisasi sebenarnya (aktual) berupa kinerja saat ini. Identifikasi kondisi meliputi pengumpulan data atau informasi yang akan dibandingkan dengan kriteria. Metode yang digunakan melalui analisisi data kinerja baik dari internal organisasi maupun eksternal atau mengembangkan *ad hoc performance measurement system*, dengan catatan variabelnya terkontrol atau hasil audit bersifat kualitatif.
3. *Effect* adalah perbedaan antara kriteria dengan kondisi. *Effect* juga merupakan dampak karena kondisi. Untuk mengembangkan dampak, auditor harus membandingkan antara kriteria dan mengidentifikasi pengaruhnya terhadap organisasi atau pelanggan sebagai akibat standar yang diharapkan tidak terpenuhi.
4. *Cause* menjelaskan mengapa atau bagaimana kondisi terjadi atau alasan mengapa kinerja tidak tercapai. Untuk menjamin validitas analisis penyebab, auditor harus melakukan pengujian bermacam alasan adanya perbedaan antara kondisi dengan identifikasi dan verifikasi hambatan dan kendala (misalnya sumber tidak layak, variabel eksternal, tindakan yang salah). Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah kualifikasi staf dan pelatihan para staf.

Dalam melakukan *performance audit*, misalnya auditor menemukan penyebab bahwa tidak tercapainya tujuan dikarenakan *inadequate control system*, auditor harus menjelaskan penyebab utamanya, seperti hubungan antara proses, input dengan *output* tidak ada, target tidak realistis atau input tidak layak. Jenis *finding* mungkin bervariasi tergantung tujuan audit. *Findings* dapat berupa diskripsi, normatif, tradisional, penyebab atau dampak. *Descriptive finding* hanya berupa kondisi, *normative finding* berupa kriteria dan kondisi, *traditional finding* menunjukkan sebab-akibat, biasanya berupa kriteria, kondisi,

penyebab dan dampak, sedangkan *impact finding* membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program diterapkan. Berikut disajikan contoh *finding* pada tabel 1.

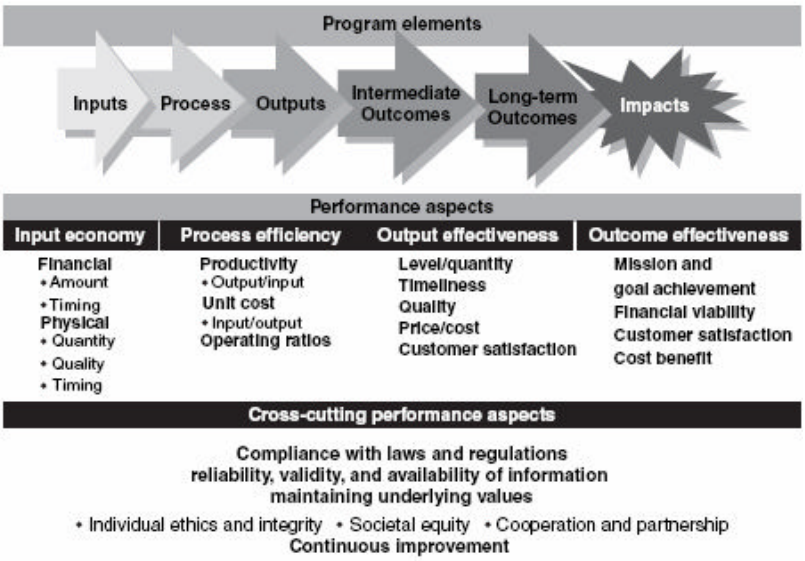
Performance auditing sering kali didasarkan pada keputusan atau permintaan legislatif. Hal tersebut merupakan salah satu ciri sektor publik, oleh karena itu pemerintah

Tabel 1:*Type of Findings*
Sumber : Raaum and Morgan, 2001

Type of finding	*Elements*	*Sample audit finding*
Descriptive	*Condition only*	*Annual cost to incarcerate a prisoner was$67,800 in 2005*
Normative was compared with	*Criteria and condition*	*Annual cost to incarcerate a prisoner condition$67,800 in 2005, $52,000 at comparable prisons.*
Traditional/causal appropriation resulting in additional significant following	*Criteria, cause, and effect*	*Annual cost to incarcerate a prisoner was $67,800 in 2005. Budget authorized $58,000 per prisoner, a deficit of$17.8 million. The costs were caused primarily by a increase in labor and benefit costs implementation of the May 2005 union contract.*
Impact treatment alcohol before dependent treatment	*Condition with cause (intervention)*	*Recidivism (re-arrest) rates among alcohol-dependent inmates who compared with participated in the condition without program release were significantly lower than rate among alcohol inmates who did not receive the cause (effect)*

secara eksplisit mengharapkan tujuan yang telah dicapai perlu diuji melalui instrumen publik seperti laporan anggaran untuk mendapatkan legitimasi melalui *performance audit*. Pemerintah dengan kewenangan menggunakan sumber dan parlemen dengan kewenangan untuk melakukan pengawasan atas penggunaan sumber tersebut akan digunakan untuk mencapai *"value"*. *"Value"* seperti ekonomi, efisien dan efektifitas merupakan aspek kinerja. Aspek kinerja merupakan dasar *"footprint"* setiap program pemerintah. Elemen setiap program pemerintah terdiri dari *input*, proses dan *outcome*. Masing-masing elemen berhubungan dengan aspek kinerja. Pemerintah diharapkan menggunakan input secara ekonomis, melaksanakan proses secara efisien dan menghasilkan *output* atau *outcome* secara efektif. Namun hal yang tidak boleh diabaikan adalah *compliance with laws and regulations; reliability, validity, and availability of information; maintenance of underlying governmental values, such as ethics, integrity, and equity; and continuous improvement*. Karena aspek kinerja menggambarkan harapan pemerintah, pemerintah harus melaksanakan *planning* dan melakukan *on going monitoring*. *"Footprint"* tersebut secara ringkas dapat digambarkan pada gambar 1.

Dalam *performance audit* harus ditetapkan tujuan audit, hal tersebut akan bermanfaat dalam melakukan audit penggunaan input secara



Gambar 1: *Footprint Program* Pemerintah
Sumber : Colleen G. Waring and Stephen L. Morgan, 2007

ekonomis, prosesnya efisien dan outputnya efektif, dengan kata lain semua aspek kinerja dilakukan pengujian. Pada prinsipnya, tujuan audit menentukan langkah apa yang akan ditempuh. Langkah audit yang ditempuh, yaitu :

1. Menetapkan ukuran efisiensi (atau indikator) yang digunakan. Auditor mengevaluasi ukuran yang ada yang digunakan.
2. Menetapkan kriteria yang digunakan.
3. Menentukan validitas laporan efisiensi atas program tersebut.
4. Menentukan apakah tingkat efisiensi telah tercapai sesuai tujuan yang ditetapkan.
5. Menentukan apakah penyebab timbulnya ketidakefisienan. Auditor membuat temuan dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Ada tiga tahap dalam *performance audit*, yaitu *planning, fieldwork, and reporting*. Tim dapat melaksanakan *performance audit* dengan optimal apabila anggota tim memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda atau dari berbagai disiplin ilmu. Anggota tim audit harus memahami tujuan *performance audit*.

6. Akuntabilitas

Prinsip dasar akuntabilitas adalah perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar,

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain (Pedoman Umum *Good Corporate Governance*, 2006). Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan dan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan.

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas adalah dasar sistem pemerintahan dimana orang-orang yang berhak memilih mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atas kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif. Patton memberikan argumen bahwa, tidak seperti para investor ketika mengakses pasar modal pada perusahaan swasta, publik tidak mempunyai kebebasan pada sektor publik. Patton menekankan bahwa *stakeholder* memberikan *judgment* atas kinerja entitas sektor publik dibandingkan dengan tujuannya dan pengurusan pekerjaan publik. Sedangkan akuntabilitas belum diberikan definisi secara konsisten, pelaporan kinerja dalam laporan kepatuhan secara tradisional oleh entitas telah dilakukan, oleh karena itu disarankan bahwa konsep akuntabilitas adalah mencakup *fiduciary accountability* (Patton, 1992).

Menurut Sinclair, ada lima bentuk akuntabilitas, yaitu politik, publik, manajerial, profesional dan personal (Sinclair, 1995). Akuntabilitas politik berhubungan dengan tanggung jawab publik kepada Menteri atau pertanggungjawaban Menteri kepada publik. Akuntabilitas publik merupakan tipe akuntabilitas yang lebih formal, yaitu bagaimana mereka memberikan pelayanan kepada publik dan melaporkan kepada publik melalui media atau survai yang meminta publik untuk memberikan komentar tentang kinerja entitas sektor publik seperti dewan lokal. Akuntabilitas manajerial, menekankan proses *monitoring* dimana input dirubah. Akuntabilitas profesional dijelaskan sebagai tugas profesional atau kelompok ahli. Akuntabilitas personal didasarkan pada kepercayaan. Akuntabilitas merupakan nilai moral dan etik. Sinclair berpendapat bahwa akuntabilitas personal adalah kekuatan kontrol psikologis. Sedangkan akuntabilitas administratif dan manajerial menekankan tanggung jawab atas kinerja.

Laughlin mengembangkan model hubungan akuntabilitas dimana ada transfer sumber dan tanggung jawab dari prinsipal kepada agen dengan harapan untuk bertindak. Ada permintaan informasi atas tindakan dan kegiatan oleh prinsipal, agen diharapkan men-*supply* informasi atas tindakan dan kegiatannya kepada prinsipal. Dasar dan tipe hubungannya meliputi kejujuran, proses, kinerja, program, kebijakan dan informasi sebelum dan sesudahnya (Laughlin, 1990).

Dari pendapat di atas jelas bahwa

informasi dari pemerintah kepada legislatif untuk membentuk *judgment* tentang pekerjaan dan kinerja pemerintah. Aliran informasi tersebut penting sebagai dasar akuntabilitas. Pemerintah mengendalikan aset dan untuk memenuhi tanggung jawabnya, mereka wajib melaporkan kinerjanya secara konsisten kepada *stakeholder* untuk menjaga akuntabilitasnya.

7. Kesimpulan

Pertanggungjawaban sektor publik menggambarkan hubungan antara pemerintah dengan legislatif. Dengan kewenangannya, pemerintah menggunakan sumber-sumber yang ada dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu tanggung jawab atas penggunaan sumber, pemerintah menyampaikan laporan keuangan. Auditor dapat meminimalkan risiko hubungan keduanya, karena independensinya. *Performance audit* mempunyai peran penting dalam mengukur efektivitas organisasi sektor publik terhadap pencapaian tujuan dan penggunaan sumber-sumber secara efisien.

Performance audit atau *Value for Money (VfM) audit* adalah mengevaluasi kinerja berdasarkan kriteria *economy – the acquisition of resources on the best possible terms; efficiency – the use of resources to achieve a given level of output* dan *effectiveness – the match between intentions and outcomes*. Auditor memberikan opini terhadap pelaksanaan suatu program atau entitas dalam mencapai tujuannya telah ekonomi, efisien dan efektif. Auditor memberikan rekomendasi langkah strategis agar tindakan pemerintah lebih efisien dan efektif, oleh karena itu auditor harus memiliki wawasan yang luas. Dalam mengungkapkan suatu permasalahan yang dijumpai dalam audit, auditor seharusnya sedapat mungkin mengungkapkan temuannya secara konstruktif meliputi *criteria, condition, cause, and effect*.

Informasi dari pemerintah kepada legislatif merupakan hal penting untuk membentuk *judgment* tentang pekerjaan dan kinerja pemerintah. Informasi tersebut penting untuk membentuk akuntabilitas dan pemerintah wajib melaporkan kinerjanya secara konsisten dengan kejujuran kepada *stakeholder*. Karena auditor dengan independensinya, *performance audit* akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada publik.

Daftar Pustaka

Collen G Waring and Stephen L. Morgan (2007). *Public Sector Performance Auditing in Developing Countries*.

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. 2006

Laughlin, RC (1990). "A Model of Financial Accountability and the Church of England", *Financial Accountability and Management*. Vol. 6. pp. 93-114.

Mardiasmo (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andy Offset.

Morin, D. (2003). "Controllers or catalysts for change and improvement: would the real value for money auditors please stand up?". *Managerial Auditing Journal*. Vol. 18. pp. 80-83

Patton, J. (1992). "Accountability and Governmental Financial Reporting", *Financial Accountability and Management*. Vol 8. p 165-180.

Power, M. (1997). *The Audit Society*. Oxford: University Press. 1997.

Raaum,R.B.,and S.L.Morgan (2001). *Performance Auditing: A Measurement Approach*. The Institute of Internal Auditors.

Sinclair, A. (1995). "The Chameleon of Accountability: Forms and Discourses". *Accounting, Organisations and Society*. Vol 20. pp. 219-237.

www.saica.co.za

www.theiia.org

www.africa-sbo.org

www.oecd.org

www.cagbd.org

www.adb.org

BIOGRAFI PENULIS

Laurentius Saptono, S.Pd., M.Si.

Lahir di Bantul, 7 April 1973. Mendapatkan gelar sarjana pendidikan ekonomi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 1996. Menyelesaikan S-2 pada Bidang Kajian Ilmu Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2003. Saat ini menjadi staf pengajar pada Program Studi Pendidikan Akuntansi, JPIPS, FKIP, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si.

Lahir di Sleman, 1 Mei 1965. Mendapatkan gelar sarjana ekonomi (S-1) Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1991. Pada tahun 1991-1992 bekerja sebagai *chief accountant* di PT. Astra Graphia dan selanjutnya bekerja sebagai *financial controller* di PT. Indofood sampai dengan tahun 2000. Terhitung mulai bulan April tahun 2000 menjadi staf pengajar pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma. Studi lanjut S-2 diselesaikannya pada bidang Ilmu Akuntansi di Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2004.

Drs. Bambang Purnomo, S.E., M.Si.

Lahir di Yogyakarta, 27 Agustus 1953. Mendapatkan gelar sarjana pendidikan ekonomi dari IKIP Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 1981 dan sarjana ekonomi dari STIE YKPN Yogyakarta pada tahun 1993. Menyelesaikan S-2 pada Bidang Kajian Akuntansi Program Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta pada tahun 2004. Saat ini menjadi staf pengajar pada Program Studi Pendidikan Akuntansi, JPIPS, FKIP, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Agustinus Heri Nugroho, S.Pd.

Lahir di Gunungkidul, 13 September 1975. Mendapatkan gelar sarjana pendidikan ekonomi dari Universitas Sanata Dharma pada tahun 1999. Sedang studi lanjut di Program Pasacasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Teknologi Pembelajaran. Sejak tahun 2001 menjadi staf pengajar di Program Studi Pendidikan Akuntansi, FKIP, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Rita Eny Purwanti, S.Pd., M.Si.

Lahir di Yogyakarta, 22 April 1970. Mendapatkan gelar sarjana pendidikan

ekonomi dari IKIP Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 1993. Menyelesaikan S-2 pada Bidang Kajian Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008. Sejak 1993 menjadi staf pengajar pada Program Studi Pendidikan Akuntansi, JPIPS, FKIP, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL
JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI DAN AKUNTANSI

Ketentuan Umum

1. Artikel yang dikirim merupakan karya asli dan belum pernah dipublikasikan di media lain.
2. Isi artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
3. Panjang artikel: 15-20 halaman (termasuk daftar pustaka), spasi: rangkap, ukuran kertas: A4, jenis font: Times New Roman 12 pt, batas margin: *Top* 4 cm, *Left* 4 cm, *Bottom* 3 cm, *Right* 3 cm.
4. Artikel dikirim dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy / file* (jenis dokumen **.rtf**-*Rich Text Format)* dengan menggunakan CD atau dikirim melalui e-mail.
5. Penulis wajib mengirimkan biodata.

Ketentuan Penulisan

1. **Sistematika artikel yang berisi gagasan atau pemikiran**: abstrak, kata-kata kunci, pendahuluan, bagian isi (terdiri dari beberapa sub judul sesuai dengan topik yang ditulis), penutup, dan daftar pustaka.
2. **Sistematika artikel yang berisi laporan penelitian**: abstrak, kata-kata kunci, pendahuluan, kajian teoritik, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, penutup, dan daftar pustaka.
3. **Abstrak** maksimal terdiri dari 200 kata ditulis dalam bahasa Inggris, spasi satu, dicetak dengan huruf miring, menjorok 0,5 cm dari margin kanan dan kiri. Abstrak untuk artikel hasil penelitian berisi tujuan penelitian, pendekatan terhadap masalah, dan hasil temuan. Abstrak untuk artikel non-penelitian berisi ringkasan isi artikel yang disajikan secara padat (minimal berisi persoalan yang diangkat dan pendekatan yang digunakan).
4. **Kata-kata kunci** terdiri dari 3-5 kata, yang menggambarkan daerah masalah yang diteliti atau istilah-istilah yang merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli.
5. **Catatan referensi** ditulis dalam tanda kurung dengan ketentuan: nama belakang, tahun, dan halaman (*jika referensi dari sumber buku*). Contoh: (Milani, 1975), (Driyarkara, 2001: 45-50)
6. **Catatan referensi yang diambil dari internet** ditulis dengan ketentuan: (1) jika dalam referensi terdapat informasi nama penulis dan tahun publikasi, maka penulisan catatan referensi mengacu pada ketentuan di atas; (2) jika dalam referensi tidak terdapat informasi nama penulis dan tahun publikasi, maka ditulis alamat *website/homepage* secara lengkap.
7. **Tabel** dilengkapi dengan judul tabel di bagian atas tabel tersebut. **Gambar/Bagan** dilengkapi dengan judul gambar/bagan di bagian bawah gambar/bagan tersebut.
8. **Daftar pustaka** disusun secara alfabetis. Nama belakang ditulis terlebih dahulu kemudian nama depan (disingkat), ketentuan ini berlaku untuk penulis asing maupun Indonesia. Ketentuan penulisan daftar pustaka menurut sumbernya:
   a. dari sumber buku: nama penulis, tahun terbit, judul (dicetak miring), edisi, nama kota dan penerbit.
      Sekaran, U. (2003). *Research Methods for Business*. Fourth Edition. USA : John Wiley & Sons, Inc.
   b. dari sumber jurnal: nama penulis, tahun terbit, judul, nama jurnal (dicetak miring), volume, nomer, halaman
      Milani, K. (1975). "The Relationship in Budget Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A Field Study". *The Accounting Review*. Vol. XII, No. 2, hlm 274 – 284.
   c. dari sumber selain buku dan jurnal: nama penulis, tahun terbit, judul, jenis sumber (dicetak miring), nama kota dan penerbit.
      Purwantini, C. (2005). "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi, dan Etika Individu Terhadap Senjangan Anggaran". *Tesis*. Malang: Universitas Brawijaya.
   d. dari sumber internet
      Haryanto. "Prospek DIY 2010". Tersedia: Http://www.jogja.co.id/RPJPd/lampiran-RPJPd-2007-2006. [27 Maret 2007]

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Jl. Affandi, Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002
Telepon (0274) 513301 Ext. 1527 , Faks. (0274) 540793
E-mail: lemlit@staff.usd.ac.id

ISSN 1978-8770